



LAPORAN KEUANGAN 2023

**BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**LAPORAN
KEUANGAN
2023
BIRO POD
SETDA PROV KALTIM**

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN	v
TANGGUNG JAWAB	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vii
LAPORAN OPERASIONAL	ix
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	x
NERACA	xi
CATATAN ATAS.....	xii
LAPORAN KEUANGAN	xii
BAB I.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	5
2.1. Ekonomi Makro	5
2.2. Kebijakan Keuangan	8
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	8
BAB III	12
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	12
3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target	17
BAB IV	18
4.1 Entitas Akuntansi.....	19
4.2 Basis Akuntansi	19
4.3 Basis Pengukuran.....	19
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	20
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi.....	20
4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan.....	20
4.4.2.1 Pendapatan – LRA.....	20
4.4.2.2 Belanja	21
4.4.2.5 Aset.....	22
4.4.2.6 Kewajiban.....	25
4.4.2.7 Ekuitas	26
BAB V	27
5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD	27
5.1.2. Belanja	27
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	28
5.1.2.2 Belanja Modal	29
5.1.4. Beban LO	30
5.1.4.1. Beban Operasi	30
5.1.4.1.1. Beban Pegawai.....	31
5.1.4.1.2. Beban Persediaan	31
5.1.4.1.3. Beban Jasa	31
5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan	32
5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas	32
5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	32
5.1.5.2.1. Aset Tetap	32
5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin.....	33

5.1.5.2.1.3.	Gedung dan Bangunan.....	33
5.1.5.2.1.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	33
5.1.5.2.1.5.	Aset Tetap Lainnya	34
5.1.5.2.1.7.	Akumulasi Penyusutan	34
5.1.5.2.2.	Aset Lainnya	34
5.1.5.2.2.1.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya.....	34
5.1.5.2.2.2.	Aset Tidak Berwujud	34
5.1.5.2.2.3.	Aset Lain-Lain	35
5.1.7.	Ekuitas	35
BAB VI.....		36
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi.....	36
6.2	Tugas dan Fungsi	36
6.3	Sumber Daya Manusia	38
BAB VII.....		39
Penutup		
Lampiran		

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2023	5
Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023	8
Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 dan 2022	27
Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022	28
Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022	29
Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2020	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 14 Realisasi Beban LO Tahun 2023 dan 2022	30
Tabel 16 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2022	33
Tabel 17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022	Error! Bookmark not defined.
Tabel 18 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2023	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2023
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2023 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2023
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2023 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2023
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2023 yang ditagih / dibayar tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2023 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2023 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2023 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVIII	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2023 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2023 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2023 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)

Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2023
Lampiran XXVI	Rekapitulasi sewa dibayar dimuka / Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXVII	Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
Lampiran XXVIII	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2023 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXIX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541)737762 – 742111

Home Page : <http://kaltimprov.go.id>

SAMARINDA 75121

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yang terdiri dari : (1) Laporan Realisasi Anggaran - LRA; (2) Laporan Operasional – LO; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; (4) Laporan Neraca Akrua; (5) Catatan Atas Laporan Keuangan, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Samarinda, Januari 2024

Kepala Biro Pemerintahan
Sumi Daerah,



Pembina Utama Muda

NIP. 19710809 199703 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
BELANJA	22.112.606.168,00	21.677.182.924,00	98,03	3.598.055.925,00
BELANJA OPERASI	20.659.796.968,00	20.258.252.924,00	98,06	3.396.715.925,00
Belanja Pegawai	151.876.835,00	143.640.000,00	94,58	21.580.000,00
Belanja Barang (Persediaan)	6.922.027.253,00	6.763.575.895,00	97,71	1.399.339.909,00
Belanja Jasa	6.345.588.020,00	6.173.712.016,00	97,29	1.364.222.006,00
Belanja Pemeliharaan	68.392.000,00	64.306.000,00	94,03	15.726.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	7.171.912.860,00	7.113.019.013,00	99,18	595.848.010,00
BELANJA MODAL	1.452.809.200,00	1.418.930.000,00	97,67	201.340.000,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.452.809.200,00	1.418.930.000,00	97,67	201.340.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(22.112.606.167,00)	(21.677.182.924,00)	98,03	(3.598.055.925,00)

Samarinda 25 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

SEKRETARIA DAERAH
Siti Sugiyanti, SE., M.Si
NTP 107102001000703 7 0006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
BEBAN	20.509.143.924,00	6.228.040.251,00	14.281.103.673	229,30
BEBAN OPERASI	20.509.143.924,00	6.228.040.251,00	14.281.103.673	229,30
Beban Pegawai - LO	143.640.000,00	139.800.000,00	3.840.000,00	2,75
Beban Persediaan	7.014.466.895,00	1.776.759.809,00	5.237.707.086,00	294,79
Beban Jasa	6.173.712.016,00	1.816.794.614,00	4.356.917.402,00	239,81
Beban Pemeliharaan	64.306.000,00	62.208.600,00	2.097.400,00	3,37
Beban Perjalanan Dinas	7.113.019.013,00	2.173.782.790,00	4.939.236.223,00	227,22
Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	258.694.438,00	(258.694.438)	(100,00)
				-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.509.143.924,00)	(6.228.040.251,00)	(14.281.103.673,00)	229,30

Samarinda 25 Januari 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
SEKRETARIAT DAERAH
1
SITI SUGIYANTI, SE., M.Si
NIP. 197106091897032006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	4.605.992.942,00	4.598.652.380,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.509.143.924,00)	(6.478.931.251,00)
RK PPKD	21.349.594.424,00	6.486.583.813,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	219.822.000,00	(312.000,00)
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	219.822.000,00	(312.000,00)
EKUITAS AKHIR	5.666.265.442,00	4.605.992.942,00

Samarinda 25 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
SEKRETARIAT
DAERAH
Siti Sugianti, SE., M.Si
NIP. 19710809 199703 2 006



NERACA
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

URAIAN	2023	2022
ASET	5.666.265.442,00	4.605.992.942,00
ASET LANCAR		
KAS DAN SETARA KAS		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
PERSEDIAAN	-	250.891.000,00
BELANJA DIBAYAR DI MUKA	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	-	250.891.000,00
ASET TETAP		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	8.471.781.407,00	7.100.851.407,00
Gedung dan Bangunan	4.251.152.000,00	4.310.918.500,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	62.048.800,00	62.048.800,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(7.452.716.765,00)	(7.452.716.765,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.332.265.442,00	4.021.101.942,00
ASET LAINNYA	334.000.000,00	334.000.000,00
Taqihan Penjualan Anqsuran	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
Aset Tidak Berwujud	465.650.000,00	465.650.000,00
Aset Lain-lain	334.000.000,00	334.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(465.650.000,00)	(465.650.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	334.000.000,00	334.000.000,00
JUMLAH ASET	5.666.265.442,00	4.605.992.942,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Beban	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN	-	-
EKUITAS		
EKUITAS	5.666.265.442,00	4.605.992.942,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.666.265.442,00	4.605.992.942,00

Samarinda, 25 Januari 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Biro Pemerintahan dan Otda
SEKRETARIAT DAERAH
Siti Sugiyanti, SE., M.Si
NIP. 19710809 199703 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berkaitan dengan pertanggung jawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta telah menerapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2023 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).

- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi kalimantan Timur Tahun 2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/16598-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan dengan Akhir Tahun

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, dengan penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi /entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada OPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan OPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia di berandanya, dapat diketahui bahwa Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2023 akan melanjutkan tren pertumbuhan positif dan diperkirakan berada pada rentang 2,85% - 3,65% lebih tinggi dari realisasi tahun 2023 yang sebesar 2,48%. Inflasi tahun 2023 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang diakibatkan oleh tingkat konsumsi masyarakat yang kembali pulih di tengah terdisrupsi pasokan pangan nasional baik dikarenakan isu domestik maupun global. Keadaan ekonomi makro ini cukup berdampak positif pada kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang membaik berkorelasi positif dengan kenaikan pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini berimplikasi pula dengan semakin besarnya dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp22.112.606.168,00 dari anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat, dengan pertimbangan tersebut tambahan anggaran yang didapat dialokasikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2023

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
01.001	01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 3.665.839.186,00		Rp. 4.612.294.686,00
0.01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.696.000,00		Rp. 5.696.000,00
	01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.696.000,00		Rp. 5.696.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
1.02	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 151.800.000,00		Rp.151.800.000,00
	02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 151.800.000,00		Rp.151.800.000,00
1.05	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 79.891.500,00		Rp. 79.891.500,00
	05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.79.891.500,00		Rp.79.891.500,00
1.06	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 214.1139.066,00		Rp.2.222.594.666,00
	06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 82.000.000,00		Rp.82.000.000,00
	06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.45.290.390,00		Rp.45.290.390,00
	06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 2.013.848.676,00	Rp.81.455.600	Rp.2.095.304.276,00
1.07	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 413.737.900,00		Rp.1.226.649.400,00
	07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 413.737.900,00	Rp.812.911.500,00	Rp.1.226.649.400,00
1.08	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 795.682.720,00		Rp.847.771.120,00
	08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.3.850.000,00		Rp.1.013.850.000,00
	08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.791.832.720	Rp.52.088.400,00	Rp.843.921.120,00
1.09	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 77.832.720,00		Rp.77.892.000
	09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 9.500.000,00		Rp.9.500.000,00

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran Murni	Tambahan	Anggaran Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)
	09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 68.392.000,00		Rp.68.392.000,00
1.003	1.003	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp. 15.134.838.032,00		Rp.17.500.311.482,00
	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp. 15.134.838.032,00		Rp.8.232.730.232,00
	01.002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp. 7.156.148.232,00	Rp.307.704.000,00	Rp.7.463.852.232,00
	01.003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Rp. 768.878.000,00		Rp.768.878.000,00
1.02	1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.4.425.278.987,00		Rp.6.483.048.437,00
	02.001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp.1.323.045.000,00	Rp.1.032.078.000,00	Rp.2.355.123.000,00
	02.002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Rp.2.452.988.987,00	Rp. 525.314.450,00	Rp.2.978.303.437,00
	02.003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.649.245.000,00	Rp.500.377.000	Rp.1.149.622.000,00
1.03	1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp.2.784.532.813,00		Rp.2.784.532.813,00
	03.001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Rp.1.322.489.073,00		Rp.1.322.489.073,00
	03.002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Rp.616.956.000,00		Rp.616.956.000,00
	03.003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp.845.087.740		Rp.845.087.740,00
Total			Rp 18.800.677.218,00	Rp 3.311.928.950,00	Rp 22.112.606.168,00

Anggaran Perubahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp22.112.168,00 sebagaimana rician diatas, mengalami kenaikan sebesar Rp3.311.928.950,00 atau sebesar 17.62 % bila dibandingkan anggaran tahun lalu mengalami peningkatan yaitu Rp438.839.317,00 kenaikan anggaran tersebut dialokasikan pada program dan kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah dengan tujuan menyelaraskan dengan misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pencapaian visinya di tahun 2023.

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efesien dan akuntabilitas (pertanggungjelasan). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset nontunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjelasan (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp21.677.182.924,00 nilai ini melampaui dari targetnya sebesar Rp21.914.459.557,00 atau sebesar 99,10 %. Bila dibandingkan pada tahun lalu maka dapat diketahui terjadi penurunan sebesar 1,18% & dari realisasi pendapatan tahun lalu sebesar Rp6.486.583.813,00. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target
--------------	---------------	--------	----------	--------

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
01.001	01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp.4.612.294.686,00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	
0.01	1.01	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.5.696.000,00	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100%
	01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.5.696.000,00	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen
1.02	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.151.800.000,00	Persentase Realisasi Keuangan	98%
	02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp.151.800.000,00	Jumlah laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan	98%
1.05	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.79.891.500,00	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	12 Dokumen/ Laporan
	05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.79.891.500,00	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 %
1.06	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.2.141.139.066,00	Persentase laporan pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	6 Orang
	06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.82.000.000,00	Jumlah Laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%
	06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.45.290.390,00	Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	12 Laporan
	06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.2.013.848.676,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 OT
1.07	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.1.226.649.400,00	Persentase jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang terealisasi	100%
	07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.413.737.900,00	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
1.08	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.795.682.720,00	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100
	08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.3.850.000,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	350
	08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.791.832.720,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
1.09	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.77.832.720,00	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	100
	09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.9.500.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit
	09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.68.392.000,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Laporan
1.003	1.003	PROGRAM PEMERINTAHAN	Rp.15.134.838.032,00	Persentase Kabupaten/Kota yang memperoleh Predikat	80%

Kode Program	Kode Kegiatan	Uraian	Anggaran	Target	
		DAN OTONOMI DAERAH		EKPPD "Tinggi"	
	1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rp.15.134.838.032	Persentase Tapal Batas Wilayah Kab/Kota yang disepakati	90%
	01.002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Rp.7.156.148.232,00	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen
	01.003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Rp.768.878.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	4 Dokumen
1.02	1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp.4.425.278.987,00	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di bidang pelaksanaan otonomi daerah	85%
	02.001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp.132.3045.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen
	02.002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	2.452.988.987,00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen
	02.003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.649.245.000,00	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan
1.03	1.03	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Rp.2.784.532.813,00	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti	100%
	03.001	Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah	Rp.1.322.489.073,00	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	1 Dokumen
	03.002	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Rp.616.956.000,00	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	1 Dokumen
	03.003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp.845.087.740,00	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	2 Laporan
Total			Rp 22.112.606.168,00		

Dalam pencapaian target-target tersebut, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2023 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp5.696.000,00 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp5.649.500,00 atau 99,18 %. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Pada tahun 2023 kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp5.696.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.649.500,00 atau 99,18%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp151.800.000,00 pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp143.640.000,00 atau 94,62%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp151.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp143.640.000,00 atau 94,62%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp79.891.500,00 pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp79.790.900,00 atau 99,87%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun

target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp79.891.500,00 dan terealisasi Rp79.790.900,00 atau 99,87%. Di tahun 2023, Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.222.594.666,00 pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.189.644.116,00 atau 98,52 %. Di tahun 2023, Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp82.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp76.637.200,00 atau 93,46%, Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp45.290.390,00 dan terealisasi sebesar Rp35.512.980,00 atau 78,41%, Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.095.304.276,00 dan terealisasi sebesar Rp2.077.493.936,00 atau 99,15 %. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp1.226.649.400,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.194.710.000,00 atau 97,4%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.226.649.400,00 dan terealisasi sebesar Rp1.194.710.000,00 atau 97,4%. Di tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang terprogram pada SIPD maka tidak ada perbandingan antara penurunan/kenaikan yang diterangkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp847.771.120,00 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp776.788.560,00 atau 91,63%. Di tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang terprogram pada SIPD maka tidak ada perbandingan antara penurunan/kenaikan yang diterangkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.850.000,00 atau 100%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp843.921.120,00 dan terealisasi sebesar Rp772.938.560,00 atau 91,59%. Di tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang terprogram pada SIPD maka tidak ada perbandingan antara penurunan/kenaikan yang diterangkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp77.892.000,00 pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp69.873.056,00 atau 89,71 %. Di tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang terprogram pada SIPD maka tidak ada perbandingan antara penurunan/kenaikan yang diterangkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal

ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp9.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.567.056,00 atau 58,6 %. Di tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang terprogram pada SIPD maka tidak ada perbandingan antara penurunan/kenaikan yang diterangkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp68.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp64.306.000,00 atau 94,03 %. Di tahun 2023 terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang terprogram pada SIPD maka tidak ada perbandingan antara penurunan/kenaikan yang diterangkan. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

8. Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp8.232.730.232,00 pada Kegiatan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp8.125.351.284,00 atau 98,7%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum***

Pada tahun 2023 Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp7.463.852.232,00 dan terealisasi sebesar Rp7.379.832.065,00 atau 98,87%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Kegiatan Fasilitas Penataan Wilayah***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.768.878.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.745.519.219,00 atau 96,96%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran - pengeluaran selama tahun 2023.

9. Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp6.483.048.437,00 pada Kegiatan Pelaksanaan Otonomi Daerah. atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp6.365.924.932,00 atau 98,19%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD*

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.355.123.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.257.324.273,00 atau 95,85%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp2.978.303.437,00 dan terealisasi sebesar Rp2.961.448.943,00 atau 99,43%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.149.622.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.147.151.716,00 atau 99,79%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

10. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp2.784.532.813,00 pada Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp2.725.810.576,00 atau 97,89%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.322.489.073,00 dan terealisasi sebesar Rp1.279.052.161,00 atau 96,72%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- *Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta*

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp616.956.000,00 dan terealisasi sebesar Rp615.890.178,00 atau 99,83%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ***Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp845.087.740,00 dan terealisasi sebesar Rp830.868.237,00 atau 98,32%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Meskipun target yang telah ditetapkan tercapai namun dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Kekurangan personil teknis karena banyak yang telah pensiun sementara belum ada tenaga pengganti.
- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Pemeriksaan oleh BPK RI dan Inspektorat pada saat banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan (*monitoring*).

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), (BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR) bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan Kebijakan Akuntansi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah telah menerapkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Melalui laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penatausahaan
Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4.4.2.3 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan

- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.4 Aset

- Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- Aset nonlancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- Pengakuan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.

- Pengukuran

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).

- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tita dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - ✓ Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- Penyajian

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah
 Kas di Bendahara Penerimaan
 Kas di Bendahara Pengeluaran
 Kas di BLUD
 Kas di Bendahara FKTP
 Kas di Bendahara BOS
 Kas Lainnya
 Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah
 Piutang Retribusi
 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
 Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
Uang Muka
Panjar Kegiatan
Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan
Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka
Beban Barang Dibayar Dimuka
Beban Jasa Dibayar Dimuka
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka
Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis
Persediaan Bahan/Material
Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Goodwill
Lisensi dan frenchise

Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Aset Lain-lain
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.5 Kewajiban

- Defenisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ KEWAJIBAN

▪ KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

▪ KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.6 Ekuitas

- Defenisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- Pengakuan

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada

saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- **Pengukuran**

Ekuitas dicatat sebesar nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Lapran Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjelasan atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2023.

5.1.1. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp22.112.606.168,00 terealisasi sebesar Rp21.677.182.924,00 atau sebesar 98.03 %. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 telah menargetkan tiga jenis belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2022 dan 2023

Uraian	31 Desember 2023		(%)	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	Rp.22.112.606.168,00	Rp.21.677.182.924,00	98,03	Rp.6.486.583.813,00	234,18
<u>Belanja Operasi</u>	Rp.20.659.796.968,00	Rp.20.258.252.924,00	98,06	Rp.6.280.413.813,00	222,56
Belanja Pegawai	Rp.151.876.835,00	Rp.143.640.000,00	94,58	Rp.139.800.000,00	2,74
Belanja Barang dan Jasa	Rp.20.507.920.133,00	Rp.20.114.612.924,00	98,08	Rp.6.140.631.813,00	227,56
<u>Belanja Modal</u>	Rp.1.452.809.200,00	Rp.1.418.930.000,00	97,67	Rp.206.152.000,00	99,74
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.1.452.809.200,00	Rp.1.418.930.000,00	97,67	Rp.206.152.000,00	588,29
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.0,00	Rp.0,00	0	Rp.0	0

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan

sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 98,06%. Dari target sebesar Rp20.659.796.968,00 terealisasi sebesar Rp20.258.252.924,00 atau 98,06 %. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023		(%)	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Operasi</u>	Rp.20.659.796.968,00	Rp.20.258.252.924,00	98,06	Rp.6.280.413.813,00	222,56
Belanja Pegawai	Rp.151.876.835,00	Rp.143.640.000,00	94,58	Rp.139.800.000,00	2,74
Belanja Barang dan Jasa	Rp.20.507.920.133,00	Rp.20.114.612.924,00	98,08	Rp.6.140.631.813,00	227,56

▪ Belanja Pegawai

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan untuk tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif ASN baik yang PNS maupun Non PNS pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp7.171.912.860,00 atau sebesar 99,17%.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023		(%)	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	Rp.20.659.796.968,00	Rp.20.258.252.924,00	98,06	Rp.6.140.631.813,00	227,56
Belanja Bahan Pakai Habis	Rp.6.922.027.253,00	Rp.6.763.575.895,00	97,71	Rp.134.213.900,00	4939,4
Belanja Jasa Kantor	Rp.6.169.705.400,00	Rp. 6.014.137.556,00	97,47	Rp.1.570.117.400,00	283,03
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp.46.362.000,00	Rp.42.276.000,00	91,18	Rp.43.335.814,00	(2,44)
Belanja Cetak dan Penggandaan	Rp.497.779.500,00	Rp.489.940.010,00	98,42	Rp.206.378.500,00	137,39

Uraian	31 Desember 2023		(%)	31 Desember 2022	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Makanan dan Minuman	Rp. 4.148.614.000,00	Rp.4.036.227.200,00	97,29	Rp.442.970.000,00	811,17
Belanja Pakaian Kerja	-	-	-	-	-
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	-	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 7.171.912.860,00	Rp.7.113.019.013,00	99,17	Rp.2.173.782.790,00	227,21
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp. 26.911.500,00	Rp.26.910.900,00	99,99	Rp12.150.000,00	121,48
Belanja Iuran Sekretariat Bersama	Rp 226.487.900,00	Rp.224.750.000,00	99,23	Rp120.000.000,00	87,29
Belanja Pengadaan Perlengkapan Kantor	Rp.31.211.000,00	Rp. 31.150.000,00	99,80	-	-
Belanja Pengadaan Peralatan Komputer	Rp. 1.102.575.200,00	Rp.1.071.511.000,00	97,18	Rp193.451.000,00	453,89
Belanja Pengadaan Peralatan Dapur	-	-		-	
Belanja Pengadaan Alat-alat Studio	Rp. 319.023.000,00	Rp.316.269.000,00	99	Rp22.150.000,00	1327,85
Jasa Tenaga Ahli / Instuktur / Narasumber	Rp. 466.650.000,00	Rp.452.150.000,00	96,89	Rp.87.950.000,00	414

5.1.2.2 Belanja Modal

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan sebesar Rp1.452.809.200,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi sebesar Rp1.418.930.000,00 atau sebesar 97,67%. Disini kami jelaskan ada belanja modal aset tetap lainnya yang terjadi reklasifikasi yaitu belanja modal ke belanja barang habis pakai.

5.1.2. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2023 sebesar Rp20.509.143.924,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp6.228.040.251,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp14.281.103.673,00 atau 229,30%. Rincian Beban LO tahun 2023 komparasian dengan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi Beban LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	Rp.20.509.143.924,00	Rp.6.228.040.251,00	229,30 %
Beban Operasional			
- Beban Pegawai	Rp.143.640.000,00	Rp.139.800.000,00	2,75
- Beban Persediaan	Rp.7.014.466.895,00	Rp.1.776.759.809,00	294,79

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Beban Jasa	Rp.6.173.712.016,00	Rp.1.816.794.614,00	239,81
- Beban Pemeliharaan	Rp.64.306.000,00	Rp.62.208.600,00	3,37
- Beban Perjalanan Dinas	Rp.7.113.019.013,00	Rp.2.173.782.790,00	227,22
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	Rp.258.694.438,00	(100)
- Beban Penyisihan Piutang	-	-	-

5.1.2.1. Beban Operasi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menanggung beban operasi sebesar Rp20.509.143.924,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp6.228.040.251,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp14.281.103.673,00 atau 229,30%. Rincian Beban Operasi tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban Operasi	Rp.20.509.143.924,00	Rp.6.228.040.251,00	229,30 %
- Beban Pegawai	Rp.143.640.000,00	Rp.139.800.000,00	2,75
- Beban Persediaan	Rp.7.014.466.895,00	Rp.1.776.759.809,00	294,79
- Beban Jasa	Rp.6.173.712.016,00	Rp.1.816.794.614,00	239,81
- Beban Pemeliharaan	Rp.64.306.000,00	Rp.62.208.600,00	3,37
- Beban Perjalanan Dinas	Rp.7.113.019.013,00	Rp.2.173.782.790,00	227,22
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	Rp.258.694.438,00	(100)
- Beban Penyisihan Piutang	-	-	-

5.1.2.1.1. Beban Pegawai

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp151.876.835,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah

yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi sebesar Rp143.640.000,00 atau sebesar 94,58%.

5.1.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang operasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp5.237.707.086,00 atau sebesar 294,79%

5.1.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.356.917.402,00 atau sebesar 239,81 %.

5.1.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.097.400,00 atau sebesar 3,37 %.

5.1.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.939.236.223,00 atau sebesar 227,22%, hal ini disebabkan antara lain:

- Banyaknya kegiatan yang dilaksanakan diluar daerah

5.1.2.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Beban Penyusutan belum bisa disajikan karena belum melakukan menghitung beban penyusutan akhir tahun dan Beban amortisasi (ATB) tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi ketetapan sebesar Rp0 atau sebesar 0 %, hal ini disebabkan karena habis manfaat pemakaian Aset Tidak Berwujud (ATB)

5.1.2.1.7. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap sebesar Rp5.332.265.442,00. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp4.021.101.942,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp1.311.163.500,00 atau 32,60%. Nilai aset tetap ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir). Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 7 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2023

Uraian	2022	Bertambah	Berkurang	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	Rp.4.021.101.942,00	Rp. 1.311.163.500,00	-	Rp.5.332.265.442,00	32,60%
Tanah	-	-	-	-	-
Peralatan dan Mesin	Rp.7.100.851.407,00	Rp.1.370.930.000,00	-	Rp.8.471.781.407,00	19,30%
Gedung dan Bangunan	Rp4.310.918.500	-	Rp.59.766.500,00	Rp.4.251.152.000,00	(1,38)%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	Rp62.048.800,00	-	-	Rp62.048.800,00	-
Konstruksi Dalam Pengerj	-	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	Rp.(7.452.716.765,00)	-	-	Rp.(7.452.716.765,00)	-

5.1.2.1.7.1. Peralatan dan Mesin

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk Tahun 2023 menganggarkan sebesar Rp1.452.809.200,00. dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.418.930.000,00 atau 97,67%.

5.1.2.1.7.2. Gedung dan Bangunan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki gedung dan bangunan karena gedung dan bangunan dimiliki oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sehingga pencatatannya tidak tersaji di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.2.1.7.3. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan.

5.1.2.1.7.4. Aset Tetap Lainnya

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Aset Tetap Lainnya.

5.1.2.1.7.5. Akumulasi Penyusutan

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2023 akumulasi penyusutan atas aset tetap Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Aplikasi SIMDA BMD.

5.1.2.1.8. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp334.000.000,00. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp334.000.000,00 maka dapat diketahui terdapat ketetapan sebesar Rp334.000.000,00 Atau 100 %. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.2.1.8.1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau dapat berubah menjadi kas (aset lancar) bila persyaratannya telah terpenuhi. Tidak terdapat kas yang dibatasi penggunaannya yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5.1.2.1.8.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan pengembangan/ pengadaan aplikasi. Pada tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0. Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp0,

maka dapat diketahui terdapat kenaikan/ penurunan sebesar Rp0 Atau 0 %. Kenaikan/ penurunan ini disebabkan oleh habisnya masa manfaat asset tidak berwujud di Tahun 2023.

5.1.2.1.8.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat

Pada tahun 2023 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat.

- Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Rekening ini merupakan akumulasi penyusutan atas aset-aset dalam kondisi rusak berat. Pada akhir tahun 2023 tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat.

5.1.3. Ekuitas

Kekayaan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 sebesar Rp.5.666.265.442,00 Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2022 terdapat ekuitas sebesar Rp4.605.992.942,00 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp4.605.992.942,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.1.060.272.500,00 atau 23%. Kenaikan ini disebabkan oleh belanja modal dan biaya peralatan / mesin dari aset tetap.

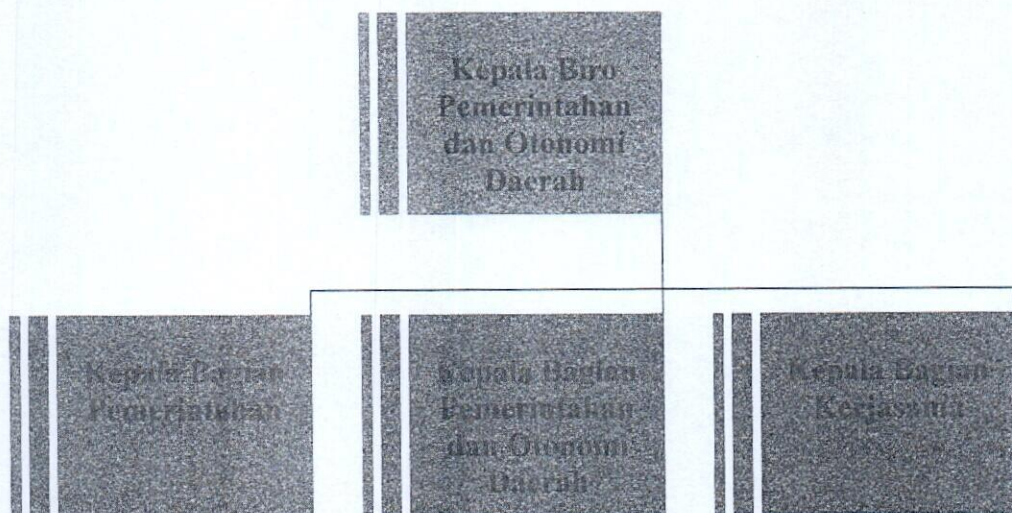
BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Gajah Mada No. 2 Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Jawa Kota Samarinda. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antar personil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut.



Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan pengendalian di bidang pemerintahan, perbatasan dan penataan wilayah, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah. Hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

Menjalankan tugas yang diberikan maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian dibidang Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Pemerintahan, Perbatasan dan Pertanahan.
- Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Kerjasama.
- Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
- Penyelenggaraan Tata Usaha Biro
- Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 8 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil BPOD Tahun 2023

Jabatan	Pendidikan						
	S3	S2	S1	D IV	D III	SMA	SMP
Kepala Biro		1					
Kepala Bagian		3					
Kepala Sub Bagian		1					
Analisis Kebijakan Ahli Muda			7				
Staf			6			8	1
Jumlah		5	14			1	1

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

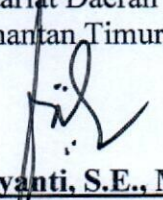
Laporan Keuangan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT, meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 25 Januari 2024
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Kalimantan Timur,



Siti Sugiyanti, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710809 199703 2 006

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2023
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2023 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2023
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2023
Lampiran VII	Rekening Koran Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2023 dengan tanggal cetak diatas 31 Desember 2023 dengan Validasi Bank
Lampiran VIII	Berita Acara Penutupan Kas Akhir Tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IX	Register Penutupan Kas Akhir Tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2023 yang ditagih / dibayar tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIX	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2023 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XX	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXI	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2023 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 Desember 2023 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XXIII	Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXIV	Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
Lampiran XXV	Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2023
Lampiran XXVI	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2023 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XXVII	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)
Lampiran XXVIII	Mapping Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Persediaan, Jasa Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas.

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGAJUAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
SPJ - ADMINISTRATIF

Nomor SPJ

SKPD

Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kode/Nama Kegiatan

Kode/Nama Subkegiatan

Tahun Anggaran

Bulan

: 16.00/05.0/000409/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/1/2024
: 4.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Daerah
: Siti Sugiyanti, SE., M.Si

: ARIANSYAH

: Semua Kegiatan

: Semua Sub Kegiatan

: 2023

: Desember

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Galj					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. Bulan Ini					
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3+13)						
5	BELANJA DAERAH	Rp22.112.606,168	Rp118.996.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp15.266.212,444	Rp2.882.859,035	Rp18.151.071,479	Rp751.590.346	Rp2.630.881,099	Rp3.382.471,445	Rp21.677.182.924	Rp435.423.244						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp20.655.796,968	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp14.614.653,444	Rp2.117.488,035	Rp16.732.141,479	Rp751.590.346	Rp2.630.881,099	Rp3.382.471,445	Rp20.258.252.924	Rp401.544.044						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp20.507.820,133	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.614.653,444	Rp2.117.488,035	Rp16.732.141,479	Rp751.590.346	Rp2.630.881,099	Rp3.382.471,445	Rp20.114.612.924	Rp399.307.209						
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp151.876,835	Rp18.890.000	Rp24.750.000	Rp43.640.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp68.236,635						
5.2	BELANJA MODAL	Rp1.452.809,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp653.559,000	Rp765.371,000	Rp1.418.930,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.418.930,000	Rp33.879,200						
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.452.809,200	Rp0	Rp0	Rp0	Rp653.559,000	Rp765.371,000	Rp1.418.930,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.418.930,000	Rp33.879,200						
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp3.248.793,286	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.087.718,011	Rp166.699,840	Rp2.254.417,851	Rp160.505,280	Rp721.423,001	Rp881.928,281	Rp3.136.346,132	Rp112.447,154						
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp5.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp6.500						
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp6.500						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp5.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp6.500						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp5.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp6.500						
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp5.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp6.500						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp5.696.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp5.649,500	Rp6.500						
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Alat Tulis Kantor	Rp3.010.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.009,500	Rp3.009,500	Rp3.009,500	Rp500						
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/ Bahan Cetak	Rp22.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp22.000						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapiet	Rp2.664.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.640,000	Rp2.640,000	Rp2.640,000	Rp100.600						
4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp79.891,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000,000	Rp13.280,000	Rp49.280,000	Rp36.000,000	Rp76.910,900	Rp30.510,900	Rp79.790,900	Rp100.600						
4.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp79.891,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000,000	Rp13.280,000	Rp49.280,000	Rp36.000,000	Rp76.910,900	Rp30.510,900	Rp79.790,900	Rp100.600						
5.1	BELANJA OPERASI	Rp79.891,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000,000	Rp13.280,000	Rp49.280,000	Rp36.000,000	Rp76.910,900	Rp30.510,900	Rp79.790,900	Rp100.600						
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp79.891,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000,000	Rp13.280,000	Rp49.280,000	Rp36.000,000	Rp76.910,900	Rp30.510,900	Rp79.790,900	Rp100.600						
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp79.891,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000,000	Rp13.280,000	Rp49.280,000	Rp36.000,000	Rp76.910,900	Rp30.510,900	Rp79.790,900	Rp100.600						
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp79.891,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000,000	Rp13.280,000	Rp49.280,000	Rp36.000,000	Rp76.910,900	Rp30.510,900	Rp79.790,900	Rp100.600						
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapiet	Rp79.891,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.000,000	Rp13.280,000	Rp49.280,000	Rp36.000,000	Rp76.910,900	Rp30.510,900	Rp79.790,900	Rp100.600						
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	Rp24.000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.300,000	Rp5.000,000	Rp20.300,000	Rp24.000,000	Rp0	Rp24.000,000	Rp24.000,000	Rp100.600						
5.1.02.02.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp24.000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.300,000	Rp5.000,000	Rp20.300,000	Rp24.000,000	Rp0	Rp24.000,000	Rp24.000,000	Rp100.600						
5.1.02.02.01.0003	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	Rp24.000,000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.300,000	Rp5.000,000	Rp20.300,000	Rp24.000,000	Rp0	Rp24.000,000	Rp24.000,000	Rp100.600						
5.1.02.02.12	Belanja Bimbingan Teknis	Rp26.911,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.910,900	Rp26.910,900	Rp26.910,900	Rp500						
5.1.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	Rp26.911,500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp26.910,900	Rp26.910,900	Rp26.910,900	Rp500						

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			4	5	s.d. Bulan Ini 6=(4+5)	7	8	s.d. Bulan Ini 9=(7+8)	10	11	s.d. Bulan Ini 12=(10+11)	13=(6+9+12)						
1	2	3																
4.01.01.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp2.722.594.666	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.333.749.291	Rp80.000.000	Rp1.413.749.291	Rp140.234.680	Rp615.660.145	Rp775.894.925	Rp2.189.644.116	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp5.342.800	
4.01.01.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perekengkapan Kantor	Rp82.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.777.200	Rp9.860.000	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp5.342.800	
5.1	BELAJA OPERASI	Rp82.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.777.200	Rp9.860.000	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp5.342.800	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp82.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.777.200	Rp9.860.000	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp5.342.800	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp82.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp66.777.200	Rp9.860.000	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp76.637.200	Rp5.342.800	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp82.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.397.200	Rp0	Rp29.397.200	Rp29.397.200	Rp29.397.200	Rp29.397.200	Rp29.397.200	Rp29.397.200	Rp602.800	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp0.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp37.380.000	Rp5.860.000	Rp47.240.000	Rp47.240.000	Rp47.240.000	Rp47.240.000	Rp47.240.000	Rp47.240.000	Rp4.760.000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp52.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.104.480	Rp2.408.500	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp9.777.410	
4.01.01.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp45.290.390	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.104.480	Rp2.408.500	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp9.777.410	
5.1	BELAJA OPERASI	Rp45.290.390	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.104.480	Rp2.408.500	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp9.777.410	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp45.290.390	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.104.480	Rp2.408.500	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp9.777.410	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp45.290.390	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp33.104.480	Rp2.408.500	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp35.512.980	Rp9.777.410	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp45.290.390	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.104.480	Rp416.000	Rp1.520.480	Rp1.520.480	Rp1.520.480	Rp1.520.480	Rp1.520.480	Rp1.520.480	Rp9.711.910	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp11.237.390	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.000.000	Rp1.992.500	Rp33.992.500	Rp33.992.500	Rp33.992.500	Rp33.992.500	Rp33.992.500	Rp33.992.500	Rp5.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp34.059.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp623.391.645	Rp663.744.645	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp1.810.340	
4.01.01.06.09	Penyediaan Barang Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp2.095.304.276	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.333.749.291	Rp80.000.000	Rp1.413.749.291	Rp40.353.000	Rp623.391.645	Rp663.744.645	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp1.810.340	
5.1	BELAJA OPERASI	Rp2.095.304.276	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.333.749.291	Rp80.000.000	Rp1.413.749.291	Rp40.353.000	Rp623.391.645	Rp663.744.645	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp1.810.340	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.095.304.276	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.333.749.291	Rp80.000.000	Rp1.413.749.291	Rp40.353.000	Rp623.391.645	Rp663.744.645	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp1.810.340	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp2.095.304.276	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.333.749.291	Rp80.000.000	Rp1.413.749.291	Rp40.353.000	Rp623.391.645	Rp663.744.645	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp2.077.493.936	Rp1.810.340	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp2.094.276	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp28.800.000	Rp8.880.000	Rp37.680.000	Rp37.680.000	Rp37.680.000	Rp37.680.000	Rp37.680.000	Rp37.680.000	Rp15.724.276	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp776	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp776	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp44.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.200.000	Rp0	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp1.200.000	Rp3.659.500	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp4.859.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.600.000	Rp8.880.000	Rp36.480.000	Rp36.480.000	Rp36.480.000	Rp36.480.000	Rp36.480.000	Rp36.480.000	Rp11.520.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp48.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp250.400.000	Rp0	Rp250.400.000	Rp250.400.000	Rp250.400.000	Rp250.400.000	Rp250.400.000	Rp250.400.000	Rp1.000.000	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp251.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.400.000	Rp80.000.000	Rp250.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp251.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp170.400.000	Rp80.000.000	Rp250.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.000.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp50.400.000	Rp0	Rp50.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp120.000.000	Rp0.000.000	Rp200.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp1.791.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.163.349.291	Rp0	Rp1.163.349.291	Rp11.553.000	Rp6614.511.645	Rp26.064.645	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.586.064	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.791.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.163.349.291	Rp0	Rp1.163.349.291	Rp11.553.000	Rp6614.511.645	Rp26.064.645	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.586.064	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.791.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.163.349.291	Rp0	Rp1.163.349.291	Rp11.553.000	Rp6614.511.645	Rp26.064.645	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.789.413.936	Rp1.586.064	
4.01.01.1.07	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Rp14.348.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp348.000	
4.01.01.1.07.06	Penyediaan Peralatan dan Meubel	Rp14.348.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp348.000	
5.1	BELAJA OPERASI	Rp14.348.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp348.000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp14.348.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp348.000	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp14.348.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp348.000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp14.348.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp348.000	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp14.348.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp14.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp14.600.000	Rp348.000	
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Rp847.771.120	Rp0	Rp0	Rp0	Rp703.368.720	Rp73.419.840	Rp776.788.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp776.788.560	Rp776.788.560	Rp776.788.560	Rp776.788.560	Rp776.788.560	Rp70.987.560	
4.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp0	
5.1	BELAJA OPERASI	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp0	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp3.850.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp3.850.000	Rp0	
4.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp843.921.120	Rp0	Rp0	Rp0	Rp699.518.720	Rp73.419.840	Rp772.938.560	Rp0	Rp0	Rp0	Rp772.938.560	Rp772.938.560	Rp772.938.560	Rp772.938.560	Rp772.938.560	Rp70.987.560	

Kode Rekening			Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/UT					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/UT) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
					1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(3+13)			
5.1	2	BELANJA OPERASI		Rp84.921.120	Rp0	Rp699.518.720	Rp73.419.840	Rp72.938.560	Rp0	Rp0	Rp72.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0			
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		Rp84.921.120	Rp0	Rp699.518.720	Rp73.419.840	Rp72.938.560	Rp0	Rp0	Rp72.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0			
5.1.02.02		Belanja Jasa		Rp43.921.120	Rp0	Rp699.518.720	Rp73.419.840	Rp72.938.560	Rp0	Rp0	Rp72.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0	Rp77.938.560	Rp0			
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor		Rp776.700.000	Rp0	Rp639.200.000	Rp66.600.000	Rp705.800.000	Rp0	Rp0	Rp705.800.000	Rp0	Rp705.800.000	Rp0	Rp705.800.000	Rp0	Rp705.800.000	Rp0			
5.1.02.02.01.0026		Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp776.700.000	Rp0	Rp639.200.000	Rp66.600.000	Rp705.800.000	Rp0	Rp0	Rp705.800.000	Rp0	Rp705.800.000	Rp0	Rp705.800.000	Rp0	Rp705.800.000	Rp0			
5.1.02.02.02		Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		Rp7.221.120	Rp0	Rp0.318.720	Rp6.819.840	Rp67.138.560	Rp0	Rp0	Rp67.138.560	Rp0	Rp67.138.560	Rp0	Rp67.138.560	Rp0	Rp67.138.560	Rp0			
5.1.02.02.02.0005		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Rp28.602.000	Rp0	Rp23.562.000	Rp2.664.000	Rp26.226.000	Rp0	Rp0	Rp26.226.000	Rp0	Rp26.226.000	Rp0	Rp26.226.000	Rp0	Rp26.226.000	Rp0			
5.1.02.02.02.0006		Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Rp44.619.120	Rp0	Rp36.756.720	Rp4.155.840	Rp40.912.560	Rp0	Rp0	Rp40.912.560	Rp0	Rp40.912.560	Rp0	Rp40.912.560	Rp0	Rp40.912.560	Rp0			
4.01.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp77.892.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp16.670.600	Rp33.202.456	Rp69.873.056	Rp69.873.056				Rp69.873.056	Rp0			
4.01.01.1.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp0.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.994.600	Rp3.572.456	Rp5.567.056	Rp5.567.056				Rp5.567.056	Rp0			
5.1		BELANJA OPERASI		Rp0.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.994.600	Rp3.572.456	Rp5.567.056	Rp5.567.056				Rp5.567.056	Rp0			
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		Rp0.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.994.600	Rp3.572.456	Rp5.567.056	Rp5.567.056				Rp5.567.056	Rp0			
5.1.02.02		Belanja Jasa		Rp0.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.994.600	Rp3.572.456	Rp5.567.056	Rp5.567.056				Rp5.567.056	Rp0			
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor		Rp0.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.994.600	Rp3.572.456	Rp5.567.056	Rp5.567.056				Rp5.567.056	Rp0			
5.1.02.02.01.0067		Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		Rp0.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.994.600	Rp3.572.456	Rp5.567.056	Rp5.567.056				Rp5.567.056	Rp0			
4.01.01.1.09.06		Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya		Rp88.392.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.676.000	Rp49.630.000	Rp64.306.000	Rp64.306.000				Rp64.306.000	Rp0			
5.1		BELANJA OPERASI		Rp88.392.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.676.000	Rp49.630.000	Rp64.306.000	Rp64.306.000				Rp64.306.000	Rp0			
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		Rp88.392.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.676.000	Rp49.630.000	Rp64.306.000	Rp64.306.000				Rp64.306.000	Rp0			
5.1.02.03		Belanja Pemeliharaan		Rp88.392.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.676.000	Rp49.630.000	Rp64.306.000	Rp64.306.000				Rp64.306.000	Rp0			
5.1.02.03.02		Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin		Rp88.392.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.676.000	Rp49.630.000	Rp64.306.000	Rp64.306.000				Rp64.306.000	Rp0			
5.1.02.03.02.0045		Belanja Pemeliharaan Alat Angkut-Asat Angkut Darat Tak Bermotor- Kendaraan Tak Bermotor Penunjang		Rp46.362.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.406.000	Rp42.276.000	Rp45.086.000	Rp45.086.000				Rp45.086.000	Rp0			
5.1.02.03.02.0045		Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer		Rp11.680.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp8.370.000	Rp3.110.000	Rp11.680.000	Rp11.680.000				Rp11.680.000	Rp0			
5.1.02.03.02.0049		Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer		Rp10.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.900.000	Rp7.450.000	Rp10.350.000	Rp10.350.000				Rp10.350.000	Rp0			
4.01.03		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH		Rp17.593.126.847	Rp0	Rp12.526.935.433	Rp1.950.788.195	Rp14.477.723.628	Rp591.085.066	Rp1.909.458.098	Rp2.500.543.164	Rp2.637.826.792	Rp280.860.055				Rp280.860.055				
4.01.03.1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		Rp7.991.622.432	Rp0	Rp6.033.776.693	Rp551.311.000	Rp6.585.087.693	Rp240.957.500	Rp1.060.486.091	Rp1.301.443.591	Rp7.288.531.284	Rp10.091.148				Rp10.091.148				
4.01.03.1.01.02		Facilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Rp7.418.697.432	Rp0	Rp5.656.641.724	Rp471.001.000	Rp6.127.642.724	Rp188.140.000	Rp1.018.999.841	Rp1.207.139.841	Rp7.334.782.065	Rp8.915.367				Rp8.915.367				
5.1		BELANJA OPERASI		Rp7.418.697.432	Rp0	Rp5.656.641.724	Rp471.001.000	Rp6.127.642.724	Rp188.140.000	Rp1.018.999.841	Rp1.207.139.841	Rp7.334.782.065	Rp8.915.367				Rp8.915.367				
5.1.02		Belanja Barang dan Jasa		Rp7.418.697.432	Rp0	Rp5.656.641.724	Rp471.001.000	Rp6.127.642.724	Rp188.140.000	Rp1.018.999.841	Rp1.207.139.841	Rp7.334.782.065	Rp8.915.367				Rp8.915.367				
5.1.02.01		Belanja Barang		Rp3.455.593.432	Rp0	Rp3.197.112.150	Rp31.000.000	Rp3.223.112.150	Rp139.865.000	Rp3.083.320	Rp3.395.580.470	Rp5.012.962	Rp5.012.962				Rp5.012.962				
5.1.02.01.01		Belanja Barang Pakai Habis		Rp3.455.593.432	Rp0	Rp3.197.112.150	Rp31.000.000	Rp3.223.112.150	Rp139.865.000	Rp3.083.320	Rp3.395.580.470	Rp5.012.962	Rp5.012.962				Rp5.012.962				
5.1.02.01.01.0024		Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		Rp178.630.432	Rp0	Rp133.028.000	Rp0	Rp133.028.000	Rp11.720.000	Rp6.213.320	Rp7.933.320	Rp170.961.320	Rp7.669.112				Rp7.669.112				
5.1.02.01.01.0026		Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak		Rp188.760.000	Rp0	Rp168.987.000	Rp0	Rp168.987.000	Rp19.380.000	Rp0	Rp19.380.000	Rp188.367.000	Rp393.000				Rp393.000				
5.1.02.01.01.0036		Belanja AlatBahan untuk Kegiatan Kantor-AlatBahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		Rp176.350.000	Rp0	Rp175.674.150	Rp0	Rp175.674.150	Rp0	Rp0	Rp0	Rp175.674.150	Rp875.890				Rp875.890				
5.1.02.01.01.0052		Belanja Makanan dan Minuman Rapet		Rp2.393.151.000	Rp0	Rp2.172.533.000	Rp31.000.000	Rp2.203.533.000	Rp48.220.000	Rp27.390.000	Rp75.610.000	Rp2.279.143.000	Rp50.010.000				Rp50.010.000				
5.1.02.01.01.0059		Belanja Pakalan Dinas KCH dan WKCH		Rp582.500.000	Rp0	Rp541.880.000	Rp0	Rp541.880.000	Rp40.545.000	Rp0	Rp40.545.000	Rp582.435.000	Rp65.000				Rp65.000				
5.1.02.02		Belanja Jasa		Rp2.416.394.000	Rp0	Rp1.558.350.000	Rp440.001.000	Rp1.998.351.000	Rp48.275.000	Rp394.750.000	Rp2.393.075.000	Rp2.393.075.000	Rp23.928.000				Rp23.928.000				
5.1.02.02.01		Belanja Jasa Kantor		Rp2.340.554.000	Rp0	Rp1.558.350.000	Rp440.001.000	Rp1.998.351.000	Rp40.000	Rp332.100.000	Rp228.500.000	Rp2.328.851.000	Rp13.703.000				Rp13.703.000				
5.1.02.02.01.0003		Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp212.650.000	Rp0	Rp204.600.000	Rp0	Rp204.600.000	Rp400.000	Rp5.650.000	Rp6.050.000	Rp210.650.000	Rp2.000.000				Rp2.000.000				
5.1.02.02.01.0004		Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan		Rp785.100.000	Rp0	Rp453.250.000	Rp0	Rp453.250.000	Rp0	Rp372.450.000	Rp372.450.000	Rp775.700.000	Rp9.400.000				Rp9.400.000				
5.1.02.02.01.0047		Honorarium Rohmatan Pelanja Jasa Penyelenggaraan Acara		Rp2.800.000	Rp0	Rp880.000	Rp0	Rp880.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp880.000	Rp2.000.000				Rp2.000.000				
5.1.02.02.01.0047		Honorarium Rohmatan Pelanja Jasa Penyelenggaraan Acara		Rp1.340.001.600	Rp0	Rp880.000	Rp440.001.000	Rp1.340.001.600	Rp0	Rp1.340.001.600	Rp0	Rp1.340.001.600	Rp0				Rp1.340.001.600				

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(13-13)			
1	2	3														
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Perabotan dan Mesin	Rp75.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.875.000	Rp17.650.000	Rp65.525.000	Rp65.525.000	Rp10.225.000	
5.1.02.02.04.00035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp75.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp47.875.000	Rp17.650.000	Rp65.525.000	Rp65.525.000	Rp10.225.000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.546.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp1.546.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp1.546.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4.01.03.1.01.03	Facilitasi Penataan Wilayah	Rp572.925.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp572.925.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang dan Jasa	Rp79.235.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pekai Habis Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp79.235.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.271.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp77.700.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00052	Belanja Makanan dan Minuman	Rp175.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	Rp175.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp13.250.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00003	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Rp162.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Rp400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp18.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp6.483.048.437	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Rp2.353.123.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4.01.03.1.02.01	BELANJA OPERASI	Rp2.353.123.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.353.123.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang	Rp2.353.123.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang Pekai Habis Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp932.019.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp1.460.600	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp116.325.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp6.610.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp223.102.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00035	Belanja Makanan dan Minuman	Rp651.504.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00052	Belanja Jasa Kantor	Rp651.504.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa Kantor	Rp651.504.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp651.504.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp13.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Rp196.500.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00007	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	Rp1.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp440.004.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp771.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp771.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp2.978.303.437	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4.01.03.1.02.02	Penataan Wilayah	Rp2.978.303.437	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1	BELANJA OPERASI	Rp2.978.303.437	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp2.978.303.437	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			4	5	s.d. Bulan Ini 6=(4+5)	7	8	s.d. Bulan Ini 9=(7+8)	10	11	s.d. Bulan Ini 12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(13+14)						
5.1.02.01.1	2	3																	
5.1.02.01.1.0001	Belanja Barang	Rp1.443.561.937	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.0002	Belanja Barang Pakai Habis	Rp1.443.561.937	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.0003	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp39.067.437	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.0006	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp100.708.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	Rp61.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp287.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Disehkan kepada Masyarakat	Rp66.685.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.00052	Belanja Makanan dan Minuman	Rp598.226.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.00059	Belanja Pakalan Dinas KDH dan WKH	Rp43.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.00075	Belanja Pakalan Batik Tradisional	Rp213.450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.1.00076	Belanja Pakalan Olahraga	Rp113.625.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp846.341.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp464.341.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp78.450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp306.450.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00007	Honorarium Rohaniwan	Rp2.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	Rp450.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Perantara	Rp8.441.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp488.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp488.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp488.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
4.01.03.1.02.03	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp1.149.022.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1	REKANA OPERASI	Rp1.149.022.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02	Belanja Barang dan jasa	Rp1.149.022.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp339.594.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp339.594.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp6.855.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp1.456.300	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp42.233.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp2.199.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp62.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.01.01.00052	Belanja Makanan dan Minuman	Rp224.340.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp313.828.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp313.828.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp77.100.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp212.440.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00007	Honorarium Rohaniwan	Rp2.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.02.01.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Perantara	Rp23.080.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp496.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp496.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	
5.1.02.04.01.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp496.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - L3 Gaji			SPJ - L5 Barang & Jasa			SPJ - UP/GU/TU			Jumlah SPJ (L5 + UP/GU/TU) s.d Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. (4+5)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. (7+8)	s.d. Bulan Lalu	Bulan Ini	s.d. (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.03.1.03	Fasilitas Kerja Sama Daerah	Rp2.784.455.978	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.391.635.638	Rp150.681.733	Rp2.542.317.571	Rp101.561.250	Rp81.931.755	Rp183.493.005	Rp2.725.810.576	Rp58.645.402
4.01.03.1.03.01	Fasilitas Kerja Sama Antar Pemerintah	Rp1.322.412.238	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.182.190.606	Rp33.650.000	Rp1.215.840.606	Rp34.455.500	Rp28.756.055	Rp63.211.555	Rp1.279.052.161	Rp43.360.077
5.1	BELAJA OPERASI	Rp1.322.412.238	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.182.190.606	Rp33.650.000	Rp1.215.840.606	Rp34.455.500	Rp28.756.055	Rp63.211.555	Rp1.279.052.161	Rp43.360.077
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.322.412.238	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.182.190.606	Rp33.650.000	Rp1.215.840.606	Rp34.455.500	Rp28.756.055	Rp63.211.555	Rp1.279.052.161	Rp43.360.077
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp35.061.478	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.455.500	Rp34.455.500	Rp0	Rp34.455.500	Rp34.455.500	Rp605.978
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp35.061.478	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp34.455.500	Rp34.455.500	Rp0	Rp34.455.500	Rp34.455.500	Rp605.978
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp3.005.978	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp0	Rp3.000.000	Rp3.000.000	Rp5.978
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp5.700.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp5.700.500	Rp5.700.500	Rp0	Rp5.700.500	Rp5.700.500	Rp0
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp600.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.750.000	Rp1.750.000	Rp0	Rp1.750.000	Rp1.750.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp4.805.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.805.000	Rp4.805.000	Rp0	Rp4.805.000	Rp4.805.000	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp19.200.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp19.200.000	Rp19.200.000	Rp0	Rp19.200.000	Rp19.200.000	Rp0
5.1.02.02	Belanja Jasa	Rp715.437.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp655.200.000	Rp33.650.000	Rp688.850.000	Rp0	Rp24.750.000	Rp24.750.000	Rp715.600.000	Rp1.837.960
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	Rp715.437.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp655.200.000	Rp33.650.000	Rp688.850.000	Rp0	Rp24.750.000	Rp24.750.000	Rp715.600.000	Rp1.837.960
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp688.950.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp655.200.000	Rp33.650.000	Rp688.850.000	Rp0	Rp0	Rp688.850.000	Rp688.850.000	Rp100.000
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	Rp36.487.900	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp36.487.900	Rp36.487.900	Rp24.750.000	Rp24.750.000	Rp61.237.900	Rp1.737.960
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp571.912.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp526.990.606	Rp0	Rp526.990.606	Rp0	Rp4.006.055	Rp4.006.055	Rp530.996.661	Rp40.016.159
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp213.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp212.767.444	Rp0	Rp212.767.444	Rp0	Rp832.556	Rp832.556	Rp213.600.000	Rp0
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	Rp213.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp212.767.444	Rp0	Rp212.767.444	Rp0	Rp832.556	Rp832.556	Rp213.600.000	Rp0
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp358.312.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp314.223.162	Rp0	Rp314.223.162	Rp0	Rp3173.499	Rp3.173.499	Rp3.173.499	Rp40.016.159
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blaskeskel, A-Luar Negeri	Rp358.312.860	Rp0	Rp0	Rp0	Rp314.223.162	Rp0	Rp314.223.162	Rp0	Rp3.173.499	Rp3.173.499	Rp3.173.499	Rp40.016.159
4.01.03.1.03.02	Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Rp816.956.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp336.964.478	Rp30.066.000	Rp48.859.700	Rp78.925.700	Rp415.890.178	Rp1.005.822
5.1	BELAJA OPERASI	Rp816.956.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp336.964.478	Rp30.066.000	Rp48.859.700	Rp78.925.700	Rp415.890.178	Rp1.005.822
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp816.956.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp336.964.478	Rp30.066.000	Rp48.859.700	Rp78.925.700	Rp415.890.178	Rp1.005.822
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp31.956.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.066.000	Rp30.066.000	Rp1.605.000	Rp31.671.000	Rp31.671.000	Rp285.000
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	Rp31.956.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.066.000	Rp30.066.000	Rp1.605.000	Rp31.671.000	Rp31.671.000	Rp285.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.504.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.460.000	Rp4.460.000	Rp0	Rp4.460.000	Rp4.460.000	Rp44.500
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp2.806.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.573.500	Rp2.573.500	Rp0	Rp2.573.500	Rp2.573.500	Rp233.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp1.612.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.605.000	Rp1.605.000	Rp0	Rp1.605.000	Rp1.605.000	Rp7.500
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	Rp1.180.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.180.000	Rp1.180.000	Rp0	Rp1.180.000	Rp1.180.000	Rp0
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Makanan dan Minuman	Rp6.012.500	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp6.012.500	Rp6.012.500	Rp0	Rp6.012.500	Rp6.012.500	Rp0
5.1.02.01.01.0052	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Rapat	Rp15.840.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp0	Rp15.840.000	Rp15.840.000	Rp0
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp385.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp47.254.700	Rp47.254.700	Rp384.219.178	Rp780.822
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp385.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp47.254.700	Rp47.254.700	Rp384.219.178	Rp780.822
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	Rp385.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp336.964.478	Rp0	Rp47.254.700	Rp47.254.700	Rp384.219.178	Rp780.822
4.01.03.1.03.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Rp845.087.740	Rp0	Rp0	Rp0	Rp677.480.754	Rp117.031.733	Rp789.512.487	Rp37.039.750	Rp4.316.000	Rp41.355.750	Rp830.868.237	Rp14.219.503
5.1	BELAJA OPERASI	Rp845.087.740	Rp0	Rp0	Rp0	Rp677.480.754	Rp117.031.733	Rp789.512.487	Rp37.039.750	Rp4.316.000	Rp41.355.750	Rp830.868.237	Rp14.219.503
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp845.087.740	Rp0	Rp0	Rp0	Rp677.480.754	Rp117.031.733	Rp789.512.487	Rp37.039.750	Rp4.316.000	Rp41.355.750	Rp830.868.237	Rp14.219.503
5.1.02.01	Belanja Barang	Rp171.331.740	Rp0	Rp0	Rp0	Rp126.750.000	Rp0	Rp126.750.000	Rp37.039.750	Rp4.316.000	Rp41.355.750	Rp170.105.750	Rp1.231.990
5.1.02.01.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp68.803.740	Rp0	Rp0	Rp0	Rp68.400.000	Rp0	Rp68.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp68.400.000	Rp403.740
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp4.764.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp4.764.000	Rp4.764.000	Rp0	Rp4.764.000	Rp4.764.000	Rp4.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp7.280.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.280.000	Rp7.280.000	Rp4.316.000	Rp6.494.750	Rp4.494.750	Rp785.250

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji					SPJ - LS Barang & Jasa					SPJ - UP/GU/TU					Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
			4	5	s.d. Bulan Ini 6=(4+5)	7	8	s.d. Bulan Ini 9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)							
1	2	3																	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp2.040.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.040.000	Rp0	Rp2.040.000	Rp2.040.000	Rp0					Rp0	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp7.550.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp7.550.000	Rp0	Rp7.550.000	Rp7.550.000	Rp0					Rp17.000	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapiat	Rp81.400.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp60.350.000	Rp0	Rp60.350.000	Rp21.048.000	Rp0	Rp21.048.000	Rp81.398.000	Rp0					Rp2.000	
5.1.02.02	Belanja jasa	Rp70.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.000.000	Rp20.350.000	Rp61.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp61.350.000	Rp0					Rp5.400.000	
5.1.02.02.01	Belanja jasa Kantor	Rp70.750.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp32.000.000	Rp20.350.000	Rp61.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp61.350.000	Rp0					Rp4.000.000	
5.1.02.02.01.0003	Belanja jasa Kantor Perbaikan, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp47.800.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp30.800.000	Rp7.500.000	Rp38.400.000		Rp0		Rp38.400.000	Rp0					Rp3.400.000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rp21.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.350.000	Rp21.350.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp21.350.000	Rp0					Rp0	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohmatman	Rp1.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.200.000	Rp400.000	Rp1.600.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp1.600.000	Rp0					Rp0	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	Rp603.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp511.730.754	Rp87.681.733	Rp599.412.487	Rp0	Rp0	Rp0	Rp599.412.487	Rp0					Rp3.587.513	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp603.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp511.730.754	Rp87.681.733	Rp599.412.487	Rp0	Rp0	Rp0	Rp599.412.487	Rp0					Rp3.587.513	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp603.000.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp511.730.754	Rp87.681.733	Rp599.412.487	Rp0	Rp0	Rp0	Rp599.412.487	Rp0					Rp3.587.513	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp151.800.000	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp143.640.000	Rp0					Rp3.160.000	
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp151.800.000	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp143.640.000	Rp0					Rp3.160.000	
4.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp151.800.000	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000			Rp0		Rp0		Rp143.640.000	Rp0					Rp3.160.000	
5.1	BELAJA OPERASI	Rp151.800.000	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp143.640.000	Rp0					Rp3.160.000	
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp151.800.000	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp143.640.000	Rp0					Rp3.160.000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekti Lainnya ASN	Rp151.800.000	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp143.640.000	Rp0					Rp3.160.000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp151.800.000	Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp143.640.000	Rp0					Rp3.160.000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp143.640.000	Rp111.600.000	Rp24.756.000	Rp136.350.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp136.350.000	Rp0					Rp7.290.000	
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/jasa	Rp1.160.000	Rp7.290.000	Rp0	Rp7.290.000	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp7.290.000	Rp0					Rp870.000	
4.01.03	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
4.01.03.1.03	Facilitasi Kerja Sama Daerah	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
4.01.03.1.03.01	Facilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
5.1	BELAJA OPERASI	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objekti Lainnya ASN	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	Rp76.835	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0		Rp0		Rp0	Rp0					Rp76.835	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp1.211.701.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.739.000	Rp765.371.000	Rp1.180.110.000	Rp0	Rp0		Rp1.180.110.000	Rp0					Rp31.591.400	
4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp1.211.701.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.739.000	Rp765.371.000	Rp1.180.110.000	Rp0	Rp0		Rp1.180.110.000	Rp0					Rp31.591.400	
4.01.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp1.211.701.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.739.000	Rp765.371.000	Rp1.180.110.000	Rp0	Rp0		Rp1.180.110.000	Rp0					Rp31.591.400	
5.2	BELAJA MODAL	Rp1.211.701.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.739.000	Rp765.371.000	Rp1.180.110.000	Rp0	Rp0		Rp1.180.110.000	Rp0					Rp31.591.400	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp1.211.701.400	Rp0	Rp0	Rp0	Rp14.739.000	Rp765.371.000	Rp1.180.110.000	Rp0	Rp0		Rp1.180.110.000	Rp0					Rp31.591.400	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp31.211.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.150.000	Rp0	Rp31.150.000	Rp0	Rp0		Rp31.150.000	Rp0					Rp61.000	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	Rp31.211.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.150.000	Rp0	Rp31.150.000	Rp0	Rp0		Rp31.150.000	Rp0					Rp61.000	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	Rp31.211.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp31.150.000	Rp0	Rp31.150.000	Rp0	Rp0		Rp31.150.000	Rp0					Rp61.000	
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	Rp123.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.999.000	Rp72.500.000	Rp122.499.000	Rp0	Rp0		Rp122.499.000	Rp0					Rp571.000	
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	Rp123.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.999.000	Rp72.500.000	Rp122.499.000	Rp0	Rp0		Rp122.499.000	Rp0					Rp571.000	
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Kemitraan/Peralatan Ukur Tanah	Rp123.070.000	Rp0	Rp0	Rp0	Rp40.999.000	Rp72.500.000	Rp122.499.000	Rp0	Rp0		Rp122.499.000	Rp0					Rp571.000	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	SPJ - LS Gaji				SPJ - LS Barang & Jasa				SPJ - UP/GU/TU				Jumlah SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. Bulan Ini	Sisa Pagu Anggaran
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(6+9+12)	14=(13-14)			
1. PPH 23			Rp15.889.500	Rp3.226.500	Rp19.116.000	Rp143.350.500	Rp12.866.600	Rp156.217.100	Rp1.984.600	Rp15.583.202	Rp23.567.802	Rp198.900.202				
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.697.274	Rp18.025.107	Rp45.722.381	Rp2.518.156	Rp3.193.590	Rp5.711.746	Rp51.434.127				
3. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.455.078	Rp20.481.396	Rp112.916.474	Rp2.887.987	Rp2.613.400	Rp6.501.387	Rp119.417.861				
4. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp858.000	Rp858.000	Rp858.000				
6. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.396.097	Rp28.260.255	Rp609.435.920				
7. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0	Rp0	Rp0	Rp402.744.918	Rp178.430.747	Rp581.175.665	Rp18.864.158	Rp9.396.097	Rp28.260.255	Rp609.435.920				
8. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp15.268.212.444	Rp2.882.859.035	Rp18.151.071.479	Rp3.588.344.701	Rp0	Rp3.588.344.701	Rp21.883.056.180				
Jumlah Penelmaian (SPD Bruto) :																
Pengeluaran :																
- SPJ :																
UP/GU									Rp751.590.346	Rp203.424.376	Rp955.014.722	Rp955.014.722				
TU									Rp0	Rp2.427.456.723	Rp2.427.456.723	Rp18.294.711.479				
LS			Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp15.268.212.444	Rp2.882.859.035	Rp18.151.071.479	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
KPPD GU																
- Potongan :																
1. Iuran Wajib Pegawai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
2. Tasarum			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
3. Askes			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
4. Taspen			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
5. Lainnya			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
6. Sewa Rumah			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
7. Bens (BLDG)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
9. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
10. Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
11. Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
13. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
14. Iuran Wajib Pegawai 8%			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
15. Iuran Wajib Pegawai 1%			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
16. Iuran Jaminan Kecelakaan 4%			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
17. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
18. Iuran Jaminan Kematian			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
19. Zakat			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
20. BPJS Kesehatan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp29.296.800	Rp3.330.000	Rp32.626.800	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
21. BPJS Ketenagakerjaan			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
22. Jaminan Hari Tua			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
23. Irtek			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
- Pajak :																
1. PPH 21			Rp15.889.500	Rp3.226.500	Rp19.116.000	Rp143.350.500	Rp12.866.600	Rp156.217.100	Rp1.984.600	Rp15.583.202	Rp23.567.802	Rp198.900.902				
2. Pajak Penghasilan Ps 22			Rp0	Rp0	Rp0	Rp27.697.274	Rp18.025.107	Rp45.722.381	Rp2.518.156	Rp3.193.590	Rp5.711.746	Rp51.434.127				
3. Pajak Penghasilan Ps 23			Rp0	Rp0	Rp0	Rp92.455.078	Rp20.481.396	Rp112.916.474	Rp2.887.987	Rp2.613.400	Rp6.501.387	Rp119.417.861				
4. Pajak Penghasilan Ps 25			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp858.000	Rp858.000	Rp858.000				
6. Pajak Penghasilan Ps 15			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp9.396.097	Rp28.260.255	Rp609.435.920				
7. Pajak Penghasilan Ps 26			Rp0	Rp0	Rp0	Rp402.744.918	Rp178.430.747	Rp581.175.665	Rp18.864.158	Rp9.396.097	Rp28.260.255	Rp609.435.920				
8. Pajak Pertambahan Nilai			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
9. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
10. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0				
SPJ (netto)																
UP/GU									Rp718.335.445	Rp196.887.209	Rp915.222.654	Rp915.222.654				
LS			Rp103.000.500	Rp21.523.500	Rp124.524.000	Rp14.572.667.874	Rp2.649.745.185	Rp17.222.413.059	Rp0	Rp2.402.349.602	Rp2.402.349.602	Rp17.346.937.059				
Pengembalian ke Kasda (STS)			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp205.873.256	Rp205.873.256	Rp205.873.256				
Jumlah Pengeluaran			Rp118.890.000	Rp24.750.000	Rp143.640.000	Rp15.268.212.444	Rp2.882.859.035	Rp18.151.071.479	Rp751.590.346	Rp2.836.754.355	Rp3.588.344.701	Rp21.883.056.180				
Saldo Kas			Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp0	Rp2.836.754.355	Rp0	Rp0	Rp0				



Bendahara Pengeluaran Pembantu,


1
Ariannyah
NIP. 198208102010011003



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REGISTER STS
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

Tanggal : 27 Desember 2023 - 31 Desember 2023

Jenis STS : ALL

No.	Tanggal	Nomor STS	Uraian	Nilai STS (Rp)
1	28-12-2023	16.00/07.0/000094/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	16.879.327
2	28-12-2023	16.00/07.0/000095/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	41.426.501
3	28-12-2023	16.00/07.0/000096/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	1.021.322
4	28-12-2023	16.00/07.0/000097/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	24.599.405
5	28-12-2023	16.00/07.0/000098/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	500.520
6	28-12-2023	16.00/07.0/000099/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	3.548.112

No.	Tanggal	Nomor STS	Uraian	Nilai STS (Rp)
7	28-12-2023	16.00/07.0/000007/UP/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Persediaan (UP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	95.735.624
8	28-12-2023	16.00/07.0/000091/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	600
9	28-12-2023	16.00/07.0/000092/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	1.586.064
10	28-12-2023	16.00/07.0/000093/TU/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023	Setor Sisa Uang Tambahan Uang Persediaan (TUP) Kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023	20.575.781
Jumlah				205.873.256

Mengetahui,

Kuasa Pengguna Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN

SEKRETARIAT DAERAH

1

Siti Sugiyanti, SE., M.Si

197108091997032006

Samarinda, 11 Januari 2024

Bendahara Pengeluaran Pembantu

ARIANSYAH

198208102010011003

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

Nomor STS : 16.00/07.0/000007/UP/4.01.0.00.0.00.03.0000/P.06/12/2023

Harap diterima uang sebesar : Rp95.735.624
(terbilang: sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)

dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

No.	Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Jumlah			Rp95.735.624

Uang tersebut diterima pada tanggal 28 Desember 2023

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran



Siti Supriyanti, SE., M.Si
NIP. 197108091997032006

Bendahara Pengeluaran Pembantu



ARIANSYAH
NIP. 198208102010011003

Catatan: STS dilampirkan slip setoran bank





KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800.1.6.6/1224 /BKD-II
TENTANG

PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda/Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengkal Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-26400000263 Tanggal 18 Juli 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU : (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	AGUS ADRIANI, SE
2.	NIP	196508171992031020
3.	TANGGAL LAHIR	17 Agustus 1965
4.	JABATAN	Analisis Kebijakan Ahli Muda
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SUB BAGIAN EVALUASI PELAKSANAAN KEERJASAMA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	26 Tahun 5 Bulan
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU
9.	MASA KERJA PENSUN	31 Tahun 6 Bulan
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	Agustus 2023
11.	PENSUN TMT	1 September 2023
12.	PENSUN POKOK	3.422.300

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI		TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
NO	NAMA	22-08-1974	27-06-1992	Nikah Tgl: 27-06-1992
1	NURLINDA			

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	NADYA INDAH NURJULIANI	09-07-2000	AGUS ADRIANI / NURLINDA	AK
2	MUHAMMAD ROMI WARDANA	28-11-2006	AGUS ADRIANI / NURLINDA	AK
3	NABILA NURSAFIRA ADRIANI	17-09-2012	AGUS ADRIANI / NURLINDA	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari 4.555.800 : 1 = 1.640.088 (dibulatkan) = 1.649.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

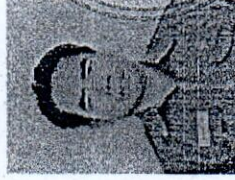
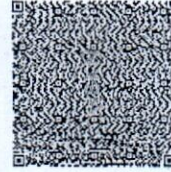
: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KETIGA

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. JAKARTA BLOK X, RT. 046, KEL. LOA BAKUNG, KEC. SUNGAI KUNJANG (75129), KOTA SAMARINDA, PROV. KALIMANTAN TIMUR.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 24 Juli 2023

Gubernur Kalimantan Timur,

Dr. Ir. Iwan Noor, M.Si

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
2. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) di Samarinda;
3. Kepala BPKAD Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Pertinggal;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Kusuma Bangsa No.3 Samarinda 75117
Telp : (0541) 580 7777 Email : bpkadkaltim@gmail.com

BERITA ACARA

Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh Empat telah dilakukan Rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim Bidang Akuntansi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov Kaltim sampai dengan bulan Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga.

Adapun hasil dari kegiatan tersebut adalah :

I. Realisasi Belanja Menurut Perhitungan Aplikasi SIPD

Belanja per 31 Desember 2023		
No	Uraian	Realisasi
1	Belanja Operasi	Rp. 20.258.252.924.00
2	Belanja Modal	Rp.1.418.930.000.00
3	Belanja BLUD	-
4	Belanja Transfer	-
Jumlah		Rp.21.677.182.924,00
Pengurangan / Penyesuaian Belanja		

II. Realisasi STS Pengembalian Belanja Menurut Aplikasi SIPD

STS Pengembalian Belanja per 31 Desember 2023			
No	Tanggal	Uraian	Realisasi
1.			

Telah dilakukan Rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim bagian Akuntansi dengan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov Kaltim dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Jumlah Belanja antara rekap manual SP2D yang dilakukan SKPD telah sesuai dengan data BIX Bank.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan.

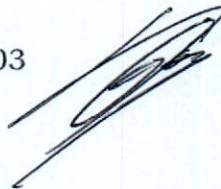
Mengetahui :

Saiful Rafiq, SE, M. Si
Nip. 19790312 2009031 1 004
Kasubbid Akuntansi Pendapatan



Yang melakukan rekonsiliasi:

Achmad Gazali Saleh, SE
Nip. 19751228 201410 1 003
Staf Subbid. Belanja



Penanggungjawab SKPD

Ariansyah
19820810 201001 1 003
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Prov
Kaltim



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023

*berdasarkan pencapaian di bix

UPTD : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Mulai Tanggal :

01 Januari 2023

S.d. Tanggal :

31 Desember 2023

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	(%)	Lebih/Kurang
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	20.659.796.968,00	20.258.252.924,00	98,06	401.544.044,00
5.1.01	Belanja Pegawai	151.876.835,00	143.640.000,00	94,58	8.236.835,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.507.920.133,00	20.114.612.924,00	98,08	393.307.209,00
5.1.05	Belanja Hibah	-	-		-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	-		-
5.2	BELANJA MODAL	1.452.809.200,00	1.418.930.000,00	97,67	33.879.200,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	-	-		-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.452.809.200,00	1.418.930.000,00	97,67	33.879.200,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		-
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		-
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		-
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-		-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	-		-
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-		-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	-	-		-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-		-
	Jumlah Belanja	22.112.606.168,00	21.677.182.924,00	98,03	435.423.244,00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA TAHUN ANGGARAN 2023

Mulai Tanggal :

01 Januari 2023

S.d. Tanggal :

31 Desember 2023

Kode	Uraian	Realisasi
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	20.258.252.924,00
5.1.1	Belanja Pegawai	143.640.000,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.114.612.924,00
5.1.5	Belanja Hibah	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	-
5.2	BELANJA MODAL	1.418.930.000,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.418.930.000,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	-
5.4	BELANJA TRANSFER	-
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	-
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-
	Jumlah Belanja	21.677.182.924,00

PT. BED KALTIM KALITARA
BED CABANG : KANTOR CABANG UTAMA
NAMA : BP. BUDI EP & OIDA
ALAMAT : JL. GAYAH MALDA NO 02 KEL. JAWA
KEC. SAMPURINDA UTU
SAMPURINDA

NO. NEMF : 962223863741000
NOMOR REKENING : 0011455719
PERIODE : 09-JAN-2024S/D 09-JAN-2024

11-01-2024 15:00:19
HALAMAN : 0001
USER ID : KIM001KCT1
MATA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
BANK DEBIT : 0.00
LONG. TRANSIT : 0.00

TANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
8-01-24	SALDO AWAL	B/F			0.00K
8-01-24	TOTAL		0.00	0.00	0.00

Catatan: Bilamana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

11 JAN 2024

bank Kalitara
MELINDA SUSRIK



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541)737762 – 742111

Home Page : <http://kaltim.go.id>

SAMARINDA 75121

BERITA ACARA PENUTUP KAS

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

Nama Lengkap : Siti Sugiyanti, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Telah melakukan penutupan kas yang dikelola oleh :

Nama Lengkap : Ariansyah

Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu

Yang berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 954/26/I-BPKAD/2022 Tanggal 30 November 2022 ditugaskan pengurusan uang pada SKPD Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah

a. Uang Kertas Bank, uang recehan = Rp. -

b. Alat pembayaran lainnya = Rp. -

c. Saldo Bank = Rp. -

d. Surat / barang berharga yang diikinkan = Rp. -

Jumlah = Rp. -

e. Saldo uang menurut buku Kas Umum,
Register dan lain sebagaimana berjumlah = Rp. -

f. Perbedaan positif/negative antara saldo = Rp. -

Penjelasan selisih : --

Mengetahui,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
SITI SUGIYANTI, SE., M.Si
NIP. 19710809 199703 2 006

Samarinda, 29 Desember 2023

Penutup Kas,
BENDAHARA PENGELUARAN,
ARIANSYAH
NIP. 19820810 201001 1 003



PEMERINTAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541)737762 – 742111

Home Page : <http://kaltim.go.id>

SAMARINDA 75121

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 29 Desember 2023
Nama penutup kas/pemegang kas : Ariansyah
Jumlah total penerimaan : Rp. 22.112.606.168,-
Jumlah total pengeluaran : Rp. 21.677.182.924,-
Saldo Buku : Rp. 0,00
Saldo Kas : Rp. 0,00
Terdiri dari :

1) Uang Kertas

- Lembar Uang Kertas Rp. 100.000,-
- Lembar Uang Kertas Rp. 50.000,-
- Lembar Uang Kertas Rp. 20.000,-
- Lembar Uang Kertas Rp. 10.000,-
- Lembar Uang Kertas Rp. 5.000,-
- Lembar Uang Kertas Rp. 2.000,-
- Lembar Uang Kertas Rp. 1.000,-

..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -

Sub Jumlah Rp. -

2) Uang Kertas

- Lembar Uang Logam Rp. 1.000,-
- Lembar Uang Logam Rp. 500,-
- Lembar Uang Logam Rp. 100,-
- Lembar Uang Logam Rp. 50,-
- Lembar Uang Logam Rp. 20,-

..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -
..... Lembar	= Rp. -

Sub Jumlah Rp. -

3) Kertas berharga dan bagian kas yang diijinkan ordonasi

Rp. -

Jumlah = Rp. -

Dengan Huruf : (Nihil)

4) Perbedaan lebih/(kurang)

= Rp. -

Mengetahui,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



SITI SUGIYANTI, SE., M.Si
NIP. 19710809 199703 2 006

Penutup Kas,

BENDAHARA PENGELUARAN,

ARIANSYAH
NIP. 19820810 201001 1 003

BERITA ACARA DATA PERSEDIAAN
S.D. TRIWULAN IV TAHUN 2023

Pada hari ini Sabtu, tanggal 13 (Tiga Belas) bulan Januari Tahun 2024, telah dilakukan Rekonsiliasi / Pemeriksaan terhadap Laporan Persediaan antara BPKAD Prov. Kaltim dengan Pengurus Barang Pembantu

Adapun hasil kegiatan tersebut adalah :

No.	Uraian	Jumlah
1	Stok Opname sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	NIHIL
2	Nilai Pengadaan Pakai Habis Manual sampai dengan Triwulan TA 2023	Rp 1.260.466.644,00
3	Nilai Pengadaan Pemeliharaan Manual sampai dengan Triwulan TA 2023	Rp 910.740.008,00

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

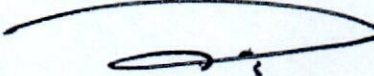

Marlina Hendriaty, S.E
NIP. 19661120 198601 2 001



YANG MELAKUKAN REKONSILIASI :

Pengurus Barang Pembantu

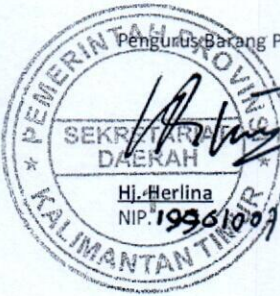

Hj. Herlina
NIP. 19701003 199003 2 004
2. Tim Pendamping,


Iglesias Bryan Febrio, A.Md.Ak.
NIP. 20000813 202301 2 005

DATA HASIL REKONSILIASI PERSEDIAAN S.D. TRIWULAN IV 2023
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hari / Tanggal : Sabtu / 13 Januari 2024
Waktu / Pukul : 08.00 S/D 16.00 WITA
Instansi : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Pengurus Barang Pembantu / HP : Hj. Herlina
/

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN APLIKASI SIKAP	PARAF
1	Saldo Awal Tahun 2023	Rp 10.400.000,00	<i>HL</i>
2	Nilai Pengadaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	Rp 1.360.809.292,00	<i>HL</i>
	Nilai Reklasifikasi Masuk sampai dengan dengan Triwulan IV Tahun 2023	NIHIL	<i>HL</i>
3	Nilai Pemakaian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	Rp 1.325.967.287,00	<i>HL</i>
	Nilai Hibah Kepada Masyarakat/Pemda sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	Rp 45.242.005,00	<i>HL</i>
4	Stok Opname sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023	NIHIL	<i>HL</i>
5	Nilai Pengadaan Pakai Habis Manual sampai dengan Triwulan IV TA 2023	Rp 1.260.466.644,00	<i>HL</i>
6	Nilai Pengadaan Pemeliharaan Manual sampai dengan Triwulan IV TA 2023	Rp 910.740.008,00	<i>HL</i>
7	Kondisi Stok Akhir Tahun 2023 (Kondisi Barang)	SESUAI	

Pengurus Barang Pembantu

Hj. Herlina
NIP. 199003 2 004

Pendamping :

Iglesias Bryan Febrio, A.Md.Ak.
NIP. 20000813 202301 2 005

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN FISIK BARANG PERSEDIAAN (STOK OPNAME)

Tahun 2023
Nomor : 000.3/ 090 /B.POD.1

Pada Hari ini Sabtu tanggal Tiga Belas bulan Januari tahun 2023 bertempat di Hotel Mercure Samarinda yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1 Nama

NIP

Jabatan
- : Siti Sugiyanti, SE.,M.Si

: 1971809 199703 2 006

: Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- 2 Nama

NIP

Jabatan
- : Umi Wahyuni

: 19700614 199002 2 002

: Kasubbag Tata Usaha
- 3 Nama

NIP

Jabatan
- : Hj. Herlina

: 19701007 199003 2 004

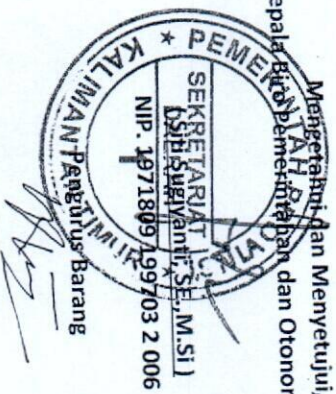
: Pengurus Barang

Telah melakukan Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stok Opname) terhadap barang persediaan yang disimpan pada Biro Pemerintahan Opname) ini. dan Otonomi Daerah dengan perincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan (Stok

KODE	NAMA REKENING	NILAI (Rp)	KETERANGAN
	SUBTOTAL	0	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

13 Januari 2024



Kasubbag Tata Usaha

(Umi Wahyuni,
NIP. 197006141990022002

(Hj. Herlina)
NIP. 19701007 199003 2 004

RINCIAN HASIL PEMERIKSAAN BARANG PERSEDIAAN (STOK OPNAME)

TAHUN 2023
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

KODE	NAMA REKENING/BARANG	VOLUME	SATUAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Aset			0	

Samarinda, 31 Desember 2023

Kasubbag Tata Usaha

(Jmt Wahyuni,)
NIP. 197005141990022002



Pengurus Barang

(Hl. Herlina)
NIP. 19701007199003 2 004

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP
TRIWULAN IV TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa Tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah dilakukan Rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Pengurus Barang Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.

Adapun hasil kegiatan rekonsiliasi tersebut adalah :

No.	Uraian	Jumlah	
1	Saldo Awal Aset Tetap 1 Januari 2023	Rp	11.414.052.207,00
2	Belanja Modal TA. S.d 31 Desember 2023	Rp	1.418.930.000,00
3	Koreksi Pengurangan	Rp	(48.000.000,00)
4	Koreksi Penambahan Diluar Belanja Modal	Rp	-
	Jumlah Total Aset Tetap 31 Desember 2023	Rp	12.784.982.207,00
	Jumlah Aset Menurut Rekap Barang Ke Neraca 31 Desember 2023	Rp	12.784.982.207,00
	Selisih	Rp	-

Penjelasan Selisih :

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan laporan Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Timur.

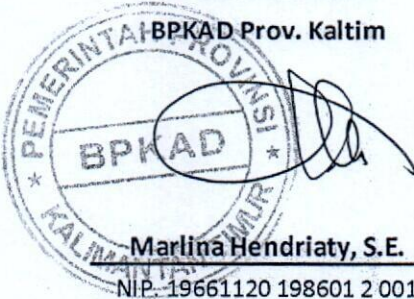
YANG MELAKUKAN REKONSILIASI

PENGURUS BARANG
Biro Pemerintahan, Perbatasan
dan Otonomi Daerah



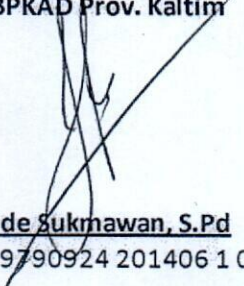
Herlina
NIP. 19701007 199003 2 004

AKPD Ahli Muda
BPKAD Prov. Kaltim



Marlina Hendriaty, S.E.
NIP. 19661120 198601 2 001

ADMIN SIMDA BMD
BPKAD Prov. Kaltim



Ade Sukmawan, S.Pd
NIP. 19790924 201406 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 01-Jan-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim
Sub Unit Organisasi : Biro Pemerintahan
U P B : Biro Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		4.866.710.207,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	4.864.101.407,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.485.457.525,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23.536.896,00
2.04	ALAT PERTANIAN	7.000.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.126.852.330,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	110.972.422,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	14.000.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	613.200,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	18.850.000,00
2.10	KOMPUTER	2.076.819.034,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	2.608.800,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.608.800,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	254.400.000,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

[Handwritten signature]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 01-Jan-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim
Sub Unit Organisasi : Biro Pemerintahan
UPB : Biro Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	254.400.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	254.400.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00



[Handwritten signature]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim
Sub Unit Organisasi : Biro Pemerintahan
U P B : Biro Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		6.285.640.207,00
1	TANAH	0,00
1.01	TANAH	0,00
2	PERALATAN DAN MESIN	6.283.031.407,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	1.485.457.525,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23.536.896,00
2.04	ALAT PERTANIAN	7.000.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.203.052.330,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	199.182.422,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	14.000.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	613.200,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	253.349.000,00
2.10	KOMPUTER	3.096.840.034,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	0,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	0,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	0,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	2.608.800,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.608.800,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	254.400.000,00
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

[Handwritten signature]



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
REKAPITULASI BARANG KE NERACA
PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : -
Bidang : Sekretariat Daerah
Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim
Sub Unit Organisasi : Biro Pemerintahan
UPB : Biro Pemerintahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	254.400.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	254.400.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	0,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	0,00



[Handwritten signature]

Unit Kerja : Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah

REKONSILIASI ASET TETAP DENGAN BELANJA MODAL DI SIMDA KEUANGAN DAN SIMDA BMD
TRIWULAN IV TAHUN 2023

No	URAIAN	ASET TETAP						ASET LAINNYA				
		TANAH	ALAT DAN MESIN	GEDUNG BANGUNAN	JALAN JARINGAN	ASET TETAP LAIN	KDP	TOTAL	RUSAK BERAT	ASET YANG AKAN DIELANGKAN	TIDAK BERNYUUD	TOTAL
A.	Saldo Akhir Neraca (31 Des 2022)	-	7.100.851.407,00	4.251.152.000,00	-	62.048.800,00	-	11.414.052.207,00	-	334.000.000,00	465.650.000,00	799.650.000,00
	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	-	4.912.101.407	-	-	2.608.800	-	4.914.710.207,00	-	334.000.000,00	254.400.000,00	588.400.000,00
	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama 2021	-	2.188.750.000	4.251.152.000,00	-	59.440.000	-	6.499.342.000,00	-	-	211.250.000,00	211.250.000,00
B.	Koreksi data tahun 2022, (jika ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Saldo awal (1 Jan 2023) stlh koreksi	-	7.100.851.407,00	4.251.152.000,00	-	62.048.800,00	-	11.414.052.207,00	-	334.000.000,00	465.650.000,00	1.599.300.000,00
D.	Belanja Modal s/d 31 Desember 2023	-	1.418.930.000,00	-	-	-	-	1.418.930.000,00	-	-	-	-
E.	Koreksi koreksi transaksi tahun 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Pengurangan : Peralatan dan Mesin yang dimutasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan berupa kendaraan roda 2 berdasarkan BAST no. 000.2.3.2/1479/B.POD.1 tanggal 21 September 2023	4 unit motor	(48.000.000,00)	-	-	-	-	(48.000.000,00)	-	-	-	-
II.	Penambahan:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Reklasifikasi Antar Aset	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Revalu Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Saldo akhir aset tetap di neraca per 31 Desember 2023	-	8.471.781.407,00	4.251.152.000,00	-	62.048.800,00	-	12.784.982.207,00	-	334.000.000,00	465.650.000,00	799.650.000,00
	Biro Pemerintahan, Perbatasan dan Otonomi Daerah	-	6.283.031.407,00	-	-	2.608.800,00	-	6.285.640.207,00	-	334.000.000,00	254.400.000,00	588.400.000,00
	Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama 2021	-	2.188.750.000,00	4.251.152.000,00	-	59.440.000,00	-	6.499.342.000,00	-	-	211.250.000,00	211.250.000,00
	Neraca Pada Simda BMD Per 31 Desember 2023	-	8.471.781.407,00	4.251.152.000,00	-	62.048.800,00	-	12.784.982.207,00	-	334.000.000,00	465.650.000,00	799.650.000,00
	Selish	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



REALISASI BELANJA PERSEDIAAN BIRO POD

PEMPROV KALTIM KODE REKENING	SALDO BUKU BESAR		Per 31 Desember 2023
	URAIAN	Nominal	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	489.940.010,00	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	141.800.000,00	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.600.000,00	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	325.461.630,00	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	517.624.150,00	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.820.000,00	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	85.082.005,00	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.036.227.200,00	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaiän Batik Tradisional	213.390.000,00	
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaiän Dinas KDH dan WKDH	725.160.000,00	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaiän Olahraga	113.625.000,00	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.686.600,00	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	27.159.300,00	
TOTAL			6.763.575.895,00

Samarinda, 23 Januari 2024

Pengurus Barang
Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah
SEKRETARIS DAERAH
NIP. 1970091199008 2004
1
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023

Analisis Vertikal	
Analisis vertikal dalam LRA	
	Uraian
Silpa = Total Pendapatan - Total Belanja dan Transfer Daerah + Total Penerimaan Pembiayaan - Total Pengeluaran Pembiayaan	
	(21.677.182.924,00)
Silpa LRA Tahun Berjalan	
	-
Total Pendapatan Tahun Berjalan	
	21.677.182.924,00
Total Belanja dan Transfer Tahun Berjalan	
	-
Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
	-
Pengeluaran Pembiayaan Tahun Berjalan	
	-
Selisih	
	-
Penjelasan :	
Analisis vertikal dalam Neraca	
	Uraian
Unaudited	
Aset = Kewajiban + Ekuitas	
	5.666.265.442,00
Aset Tahun Berjalan	
	0,00
Kewajiban Tahun Berjalan	
	5.666.265.442,00
Ekuitas Tahun Berjalan	
	-
Selisih	
	-
Penjelasan :	
Analisis vertikal dalam LO	
	Uraian
Unaudited	
Surplus/(Defisit) = Total Pendapatan - Total Beban + Total Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional + Total Pos Luar Biasa	
	(20.509.143.924,00)
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan	
	-
Total Pendapatan Tahun Berjalan	
	20.509.143.924,00
Total Beban Tahun Berjalan	
	0,00
Total Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun Berjalan	
	-
Total Pos Luar Biasa Tahun Berjalan	
	-
Selisih	
	-
Penjelasan :	
Analisis vertikal dalam LPE	
	Uraian
Unaudited	
Ekuitas Akhir = Ekuitas Awal + Surplus/(Defisit) LO + Koreksi Ekuitas	

Ekuitas Akhir Tahun Berjalan	5.666.265.442,00
Ekuitas Awal Tahun Berjalan	4.605.992.942,00
Surplus/(Defisit) LO Tahun Berjalan	(20.509.143.924,00)
Koreksi Ekuitas Tahun Berjalan	219.822.000,00
Selisih	21.349.594.424,00
Penjelasan : Nilai merupakan RK PPKD	

Uraian		Unaudited
Ekuitas Awal = Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1		
Ekuitas Awal Tahun Berjalan		4.605.992.942,00
Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1		4.605.992.942,00
Selisih		-
Penjelasan :		

Analisis Horizontal		
Analisis Horizontal antara LRA dan Neraca		
Uraian		Unaudited
SILPA/(SIKPA) (LRA) = Kas di Kasda (Neraca) + Kas di Bend. Penerimaan (Neraca) + Kas di Bend. BLUD (Neraca) + Kas di Bend. FKTP (Neraca) + Kas di Bend. BOS (Neraca) + Setara Kas di BUD (Neraca) + Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Terkait Utang PFK (Neraca) - Utang PFK (Neraca)		
SILPA/SIKPA Tahun Berjalan (LRA)		(21.677.182.924,00)
Kas di Kasda Tahun Berjalan (Neraca)		-
Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan (Neraca)		-
Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan (Neraca)		-
Kas di Bendahara BLUD Tahun Berjalan (Neraca)		-
Kas di Bendahara FKTP Tahun Berjalan (Neraca)		-
Kas di Bendahara BOS Tahun Berjalan (Neraca)		-
Setara Kas di BUD Tahun Berjalan (Neraca)		-
Investasi Jangka Pendek		0,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran (Selain BUD) Tahun Berjalan - Terkait Utang PFK (Neraca)		0,00
Utang PFK Tahun Berjalan (Neraca)		0,00
Selisih		(21.677.182.924,00)
Nilai tersebut merupakan Nilai SILPA tahun berjalan yang memang dimana pendapatan tidak terdapat pada Biro POD, dan nilai tersebut juga merupakan nilai dari realisasi belanja pada Biro POD		

Uraian		Unaudited
Belanja Modal Tanah (LRA) = Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Tanah Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Berjalan (LRA)		-
Penambahan (Penurunan)		-
	Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	-
	Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)	-
Selisih		-
Penjelasan : Belanja Modal Peralatan Mesin yaitu Printer, Komputer, dan Laptop sebesar Rp. 130.023.000		

Uraian		Unaudited
Belanja Modal Peralatan & Mesin (LRA) = Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Peralatan & Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)		1.418.930.000,00
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)		
		8.471.781.407,00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)		
		7.100.851.407,00
Selisih		(48.000.000,00)
Penjelasan : Koreksi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yaitu Aset Kendaraan Motor Roda Dua		
Uraian		Unaudited
Belanja Modal Gedung & Bangunan (LRA) = Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)		-
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)		
		4.251.152.000,00
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)		
		4.310.918.500,00
Selisih		(59.766.500,00)
Penjelasan : Mutasi Aset Tetap Antar SKPD dikarenakan pencatatan yg salah masuk ke Biro POD		
Uraian		Unaudited
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (LRA) = Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)		-
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)		
		-
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)		
		-
Selisih		-
Penjelasan :		
Uraian		Unaudited
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (LRA) = Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Tetap Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)		-
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)		
		62.048.800,00
Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca)		
		62.048.800,00
Selisih		-
Penjelasan		
Uraian		Unaudited
Belanja Modal Aset Lainnya - Tdk Berwujud(LRA) = Aset Lainnya - Tdk Berwujud Tahun Berjalan (Neraca) - Aset Lainnya - Tdk Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Berjalan (LRA)		0,00
Penambahan/(Penurunan)		
Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun Berjalan (Neraca)		
		465.650.000,00

Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Tahun 20NN-1 (Neraca)	
Selisih	465.650.000,00
Penjelasan :	-

Analisis Horizontal antara Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca	
Uraian	
Unaudited	
Ekuitas Awal Tahun Berjalan (LPE) = Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1 (Neraca)	4.605.992.942,00
Ekuitas Awal Tahun Berjalan (LPE)	4.605.992.942,00
Ekuitas Akhir Tahun 20NN-1 (Neraca)	4.605.992.942,00
Selisih	-
Penjelasan :	-

Uraian	
Unaudited	
Ekuitas Akhir Tahun Berjalan (LPE) = Ekuitas Tahun Berjalan (Neraca)	5.666.265.442,00
Ekuitas Akhir Tahun Berjalan (LPE)	5.666.265.442,00
Ekuitas Tahun Berjalan (Neraca)	5.666.265.442,00
Selisih	-
Penjelasan :	-

Analisis Horizontal antara LO dan LPE	
Uraian	
Unaudited	
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LO) = Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LPE)	(20.509.143.924,00)
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LO)	(20.509.143.924,00)
Surplus/(Defisit) Tahun Berjalan (LPE)	(20.509.143.924,00)
Selisih	-
Penjelasan :	-

Analisis Horizontal antara LO, LRA dan Neraca	
Uraian	
Unaudited	
Uraian	
Unaudited	
Beban Pegawai (LO) = Belanja Pegawai (LRA) + Utang Belanja Pegawai (Neraca) - Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)	143.640.000,00
Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	143.640.000,00
Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	143.640.000,00
Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	-
Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan	-

Uraian	
Unaudited	

PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN BARANG DAN JASA DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI
Beban Barang & Jasa (LO) = Belanja Barang & Jasa (LRA) + Utang Belanja Barang & Jasa (Neraca) - Utang Belanja Barang & Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca) - Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka (Neraca) + Beban Barang dan
Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)

Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	20.365.503.924,00
Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	20.114.612.924,00
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	-
Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	-
Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	250.891.000,00
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan:	-

PENGUJIAN INI DILAKUKAN JIKA ENTITAS MENYAJIKAN BEBAN PERSEDIAAN DI FACE LO - JIKA TIDAK ABAIKAN HASIL FORMULA INI
Pengujian persediaan hanya bisa diterapkan oleh satuan kerja yang menerapkan pencatatan periodik
Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Terkait Persediaan (LRA) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)

Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO) - Diinput secara manual	7.014.466.895,00
Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA) - harap disiapkan lampiran rincian objek belanja atau objek belanja (jika keseluruhan dari rincian objek belanja dalam objek belanja) yang menjadi persediaan - Diinput secara manual	6.763.575.895,00
Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	-
Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	250.891.000,00
Selisih	-
Penjelasan:	-

Uraian	Unaudited
Beban Peny. Aset Tetap Peralsin (LO) = Akm. Peny. Aset Tetap Peralsin Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Tetap Peralsin (Neraca)	-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LO)	(8.665.268.850,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(8.665.268.850,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan :	-

Uraian	Unaudited
Beban Peny. Aset Tetap Gedung & Bangunan (LO) = Akm. Peny. Aset Tetap Gedung & Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Tetap Gedung & Bangunan (Neraca)	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	-
Selisih	-
Penjelasan	-

Uraian		Unaudited
Beban Peny. Aset Tetap JU (LO) = Akm. Peny. Aset Tetap JU Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Tetap JU (Neraca)		
Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Selish		
Penjelasan		

Uraian		Unaudited
Beban Peny. Aset Tetap Lainnya (LO) = Akm. Peny. Aset Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Peny. Aset Lainnya (Neraca)		
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LO)		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Selish		
Penjelasan		

Uraian		Unaudited
Beban Amortisasi (LO) = Akm. Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca) - Akm. Amortisasi (Neraca)		
Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)		
Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)		
Akumulasi Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca)		
Selish		
Penjelasan: Koreksi atas Lebih Saji Akumulasi Amortisasi TA 2022 pada Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp. 89.799.000,00		

Samarinda 25 Januari 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah


SNI SUGWANTI, SE, M.Si
NIP. 19710809 199703 2 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT SETORAN SISA
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(S3TU)

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGELUARAN SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 0009/SETOR/TU.NIHIL/BPOD/03.02/2023

Tanggal : 28 December 2023

KE REKENING KAS DAERAH : BPD KALTIMTARA 0011203706

- A. 1. Urusan : 4.01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2. Unit Organisasi : 4.01 . 01 Sekretariat Daerah
3. Sub Unit Organisasi : 4.01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran
Nama : ARIANSYAH
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2. Alamat :
- C. Kode Rekening : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah
- D. Jumlah Setoran : Rp. 1.012.322,00
Dengan Huruf : Satu juta dua belas ribu tiga ratus dua puluh dua Rupiah
- E. Untuk Keperluan : Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 28 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

Diterima oleh :

REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI

Tanggal : 28 DEC 2023.



bankaltimtara
MELINDA GUSTIR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT SETORAN SISA
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(S3TU)

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGELUARAN SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 0003/SETOR/TU.NIHIL/BPOD/01.02/2023

Tanggal : 28 December 2023

KE REKENING KAS DAERAH : BPD KALTIMTARA 0011203706

- A. 1. Urusan : 4.01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2. Unit Organisasi : 4.01 . 01 Sekretariat Daerah
3. Sub Unit Organisasi : 4.01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran
- Nama : ARIANSYAH
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2. Alamat :
- C. Kode Rekening : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah
- D. Jumlah Setoran : Rp. 24.599.405,00
- Dengan Huruf : Dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima Rupiah
- E. Untuk Keperluan : Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 28 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN



ARIANSYAH

NIP. 19820810 201001 1 003

Diterima oleh :

REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI

Tanggal :

28 DEC 2023

bankaltimtara
MELINDA GUSTIN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT SETORAN SISA
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(S3TU)

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGELUARAN SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 0004/SETOR/TU.NIHIL/BPOD/01.03/2023

Tanggal : 28 December 2023

KE REKENING KAS DAERAH : BPD KALTIMTARA 0011203706

- A. 1. **Urusan** : 4.01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2. **Unit Organisasi** : 4.01 . 01 Sekretariat Daerah
3. **Sub Unit Organisasi** : 4.01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- B. 1. **Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran**
- Nama** : ARIANSYAH
- Jabatan** : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2. **Alamat** :
- C. **Kode Rekening** : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah
- D. **Jumlah Setoran** : **Rp.** 20.575.781,00
- Dengan Huruf** : Dua puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu Rupiah
- E. **Untuk Keperluan** : Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Diterima oleh :
REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI
Tanggal :



bankaltimtara
MELINDA GUSTI R



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**SURAT SETORAN SISA
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(S3TU)**

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGELUARAN SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 0008/SETOR/TU.NIHIL/BPOD/03.01/2023

Tanggal : 28 December 2023

KE REKENING KAS DAERAH : BPD KALTIMTARA 0011203706

- A. 1. **Urusan** : 4.01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2. **Unit Organisasi** : 4.01 . 01 Sekretariat Daerah
3. **Sub Unit Organisasi** : 4.01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- B. 1. **Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran**
- Nama : ARIANSYAH
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2. **Alamat** :
- C. **Kode Rekening** : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah
- D. **Jumlah Setoran** : Rp. 41.426.501,00
- Dengan Huruf** : Empat puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus satu Rupiah
- E. **Untuk Keperluan** : Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 28 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN



ARIANSYAH

NIP. 19820810 201001 1 003

28 DEC 2023

Diterima oleh :

REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI

Tanggal :

bankaltimtara
MELINDA GUSTI R



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT SETORAN SISA
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(S3TU)

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGELUARAN SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 0006/SETOR/TU.NIHIL/BPOD/02.02/2023

Tanggal : 28 December 2023

KE REKENING KAS DAERAH : BPD KALTIMTARA 0011203706

- A. 1. Urusan : 4.01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2. Unit Organisasi : 4.01 . 01 Sekretariat Daerah
3. Sub Unit Organisasi : 4.01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran
- Nama : ARIANSYAH
- Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2. Alamat :
- C. Kode Rekening : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah
- D. Jumlah Setoran : Rp. 3.548.112,00
- Dengan Huruf : Tiga juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus dua belas Rupiah
- E. Untuk Keperluan : Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 28 Desember 2023

BENDAHARA PENGELUARAN

Diterima oleh :

REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI

Tanggal :

28 DEC 2023



ARIANSYAH

NIP. 19820810 201001 1 003

bankaltimara
MELINDA GUSTIK



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SURAT SETORAN SISA
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(S3TU)

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGELUARAN SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 0007/SETOR/TU.NIHIL/BPOD/02.03/2023

Tanggal : 28 December 2023

KE REKENING KAS DAERAH : BPD KALTIMTARA 0011203706

- A. 1. Urusan : 4.01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2. Unit Organisasi : 4.01 . 01 Sekretariat Daerah
3. Sub Unit Organisasi : 4.01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

- B. 1. Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran
Nama : ARIANSYAH
Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2. Alamat :

C. Kode Rekening : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah

D. Jumlah Setoran : Rp. 500.520,00
Dengan Huruf : Lima ratus ribu lima ratus dua puluh Rupiah

E. Untuk Keperluan : Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Diterima oleh :
REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI
Tanggal : 28 DEC 2023



ARIANSYAH

NIP. 19820810 201001 1 003

bankaltimtara
MELINDA GUSTI R



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**SURAT SETORAN SISA
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
(S3TU)**

Lembar Untuk
WAJIB SETOR /
BENDAHARA
PENGELUARAN SEBAGAI
BUKTI SETORAN

Nomor : 0005/SETOR/TU.NIHIL/BPOD/02.01/2023

Tanggal : 28 December 2023

KE REKENING KAS DAERAH : BPD KALTIMTARA 0011203706

- A. 1. **Urusan** : 4.01 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
2. **Unit Organisasi** : 4.01 . 01 Sekretariat Daerah
3. **Sub Unit Organisasi** : 4.01 . 03 . 05 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- B. 1. **Wajib Setor/Bendahara Pengeluaran**
- Nama** : ARIANSYAH
- Jabatan** : BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
2. **Alamat** :
- C. **Kode Rekening** : 1 . 1 . 1 . 01 . 01 Kas di Kas Daerah
- D. **Jumlah Setoran** : **Rp.** 16.879.327,00
- Dengan Huruf** : Enam belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh Rupiah
- E. **Untuk Keperluan** : Setor Sisa Tambahan Uang Persediaan (TUP) kegiatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kaltim Tahun Anggaran 2023

Samarinda, 28 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN

Diterima oleh :
REKENING KAS UMUM DAERAH / BANK PERSEPSI
Tanggal : 28 DEC 2023



NIP. 19820810 201001 1 003

bankaTimara
MELINDA GUSTI...